

RENCANA KERJA TAHUN 2024



DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt, atas Taufiq, Hidayah dan Karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024 merupakan acuan perencanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai acuan SKPD selama satu tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024 yang merupakan hasil sinergi dari banyak pihak terkait dalam proses penyusunan RKPD. Rancangan Akhir Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan disusun sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diemban oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jombang di bidang Pangan dan Perikanan. Sistematika dokumen Rancangan Akhir Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Harapan kami semoga Rancangan Akhir Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ini bisa digunakan sebagai acuan/ pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan perikanan yang sinergis, partisipatif, transparan dan akuntabel sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik, sejalan dengan target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dan memberi hasil yang nyata bagi pengembangan ketahanan pangan dan perikanan di Kabupaten Jombang.

Jombang, 07 Juli 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Ditandatangani secara elektronik



N RD NURKAMALIA, SKM., M.Si.

NIP. 196501011986032036

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| Kata Pengantar | I |
| Daftar Isi | Ii |
| Daftar Tabel..... | Iii |
| Daftar Lampiran..... | Iv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 4 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | 7 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | 7 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 15 |
| 2.3 Isus-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 19 |
| 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD | 24 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 24 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | 28 |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 28 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran OPD Tahun 2024 | 30 |
| 3.3 Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 | 30 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 35 |
| BAB V PENUTUP | 55 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman | |
|-----------|---|----|
| Tabel 2.2 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang | 17 |
| Tabel 2.4 | Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 | 26 |
| Tabel 4.1 | Rencana Kerja dan Pendanaan | 36 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Tabel 2.1)
- Lampiran 2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Jombang (Tabel 2.3)
- Lampiran 3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 (Tabel 3.1)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan di bidang ketahanan pangan dan perikanan merupakan pedoman dan dasar dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan perikanan daerah karena melalui perencanaan yang tepat diharapkan pelaksanaan pembangunan menjadi lebih terencana, lebih berkualitas serta tepat sasaran sesuai dengan target perencanaan serta memberikan hasil yang nyata pada kehidupan masyarakat. Penyusunan perencanaan pembangunan berpedoman pada undang-undang dan peraturan sebagai dasar hukum dengan memperhatikan kebutuhan berdasarkan skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan yang dinamis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka masing-masing Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan dalam Rencana Strategis dan dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja. Dokumen perencanaan tersebut merupakan perwujudan pencapaian tujuan dan sasaran dari Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen rencana kerja tahunan Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai arti yang penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi Kepala Daerah dan tujuan, sasaran serta program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program, kegiatan maupun sub kegiatan kedalam KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Plafon Prioritas Anggaran Sementara) dan perencanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana tingkat capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD
3. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang tahun 2024 merupakan perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, rencana lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan perkiraan maju. Pagu indikatif tersebut menjadi acuan dalam proses penyusunan penganggaran pada tahun 2024. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan juga berkorelasi dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024, Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, Renja K/L dan Renja Provinsi. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Organisasi Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah :

- a) Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015;
- c) Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- d) Undang – Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No 45 Tahun 2009
- e) Undang – Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pencana Pembangunan Daerah
- g) Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi.
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi RRPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJMD, RPJMD dan RKPD.

- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
- l) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom baru.
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005 – 2025.
- n) Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023, tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026.
- o) Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2023, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
- p) Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok & Fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang tahun 2024 ditetapkan dengan maksud untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2024 bagi seluruh aparatur lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang sehingga mampu.

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan PD;
2. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RKPD Kabupaten Jombang dengan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ;

3. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu satu tahun dalam urusan ketahanan pangan dan perikanan, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Jombang.
4. Menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan.
Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang tahun 2024 antara lain adalah :
 1. Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang tahun 2024.
 2. Untuk meningkatkan sinergitas dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ketahanan pangan dan perikanan.
 3. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga merupakan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta dasar perencanaan program dan kegiatan mendatang sehingga dapat terlaksana lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mampu mengakomodir semua aspirasi sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dinamis.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian dokumen Rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Penyesuaian Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya dengan demikian akan dapat terukur tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan 8 program dan 18 kegiatan dan 40 sub kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Tahun 2023 dengan pagu Belanja Langsung sebesar Rp 7.842.620.868,-. Sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan untuk belanja langsung tahun 2023 sebesar Rp 3.089.369.018,- atau sebesar 36,50 %. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, dengan realisasi capaian 0 %
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat , dengan rata-rata realisasi capaian sebesar 0 %
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dengan rata-rata realisasi capaian sebesar 0 %
4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan rata-rata realisasi capaian sebesar 0 %

5. Program Penanganan Kerawanan Pangan, dengan rata-rata realisasi capaian sebesar 0 %
6. Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan rata-rata realisasi capaian sebesar 0 %

Program yang menunjukkan pencapaian target kinerja masih sangat rendah tersebut dikarenakan target yang telah ditetapkan pada indicator program merupakan target tahunan, sehingga sampai dengan tribulan II belum dapat menyajikan capaian kinerja.

Realisasi Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan, dengan realisasi 0 %.
2. Kegiatan Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi, dengan rata-rata realisasi capaian sebesar 0 %
3. Kegiatan Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, dengan rata-rata realisasi capaian sebesar 0 %
4. Kegiatan Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota, dengan rata-rata realisasi capaian sebesar 0 %
5. Kegiatan Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dengan rata-rata realisasi capaian sebesar 0 %

Kegiatan yang menunjukkan pencapaian target kinerja masih sangat rendah tersebut dikarenakan target yang telah ditetapkan pada indicator kegiatan merupakan target tahunan, sehingga sampai dengan tribulan II belum dapat menyajikan capaian kinerja.

Realisasi Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 %.
2. Sub Kegiatan Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 %.
3. Sub Kegiatan Penyusunan, pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 %.
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 %.
5. Sub Kegiatan Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 %.
6. Sub Kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 %.
7. Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas nelayan kecil dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 %.
8. Sub Kegiatan Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 %.
9. Sub Kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 %.

Kegiatan yang menunjukkan pencapaian target kinerja masih sangat rendah tersebut dikarenakan target yang telah ditetapkan pada indicator kegiatan merupakan target tahunan, sehingga sampai dengan tribulan II belum dapat menyajikan capaian kinerja.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50 %.

Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50 %
2. Kegiatan Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sugai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50 %.
3. Kegiatan Pengelolaan pembudidayaan ikan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50 %.
4. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50 %.
5. Kegiatan Administrasi, Keuangan perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50 %.
6. Kegiatan Administrasi barang milik Daerah pada perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 %.
7. Kegiatan Administrasi umum perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50 %.
8. Kegiatan Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 %.
9. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50 %.
10. Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50 %.

Realisasi Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 9 % (pelaksanaan sesuai dengan penentuan target dan anggaran kas yang telah ditentukan)
2. Sub Kegiatan Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50 %

3. Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50 %.
4. Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50 %.
5. Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50 %.
6. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50 %.
7. Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50 %.
8. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50 % .
9. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 %.
10. Sub Kegiatan Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 % .
11. Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 %.
12. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 %.
13. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 %.
14. Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 %.
15. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50 %.
16. Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 % .

17. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50 %.
18. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%.
19. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50 %.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Realisasi program yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 61,06 %.

Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah kabupaten/Kota, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 117,57 %.

Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 57 %.
2. Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 111 %.
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudiaya ikan kecil, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 91 %.
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 60 %
5. Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 67 %

6. Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber Daya air dan listrik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 60 %
-
4. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
 - Faktor penyebab tidak tercapainya target program/kegiatan, antara lain :
 - Masih beredar pangan segar asal tumbuhan yang tidak aman.
 - Kenaikan produksi benih UPR maupun UPT masih belum optimal.
 - Beberapa target berupa dokumen pelaporan ataupun analisis seperti tingkat stabilitas, ketersediaan informasi harga pangan, neraca bahan makanan, pemutakhiran peta ketahanan dan kerentanan pangan dan skor pola harapan merupakan pengolahan data yang dilakukan tahunan sehingga dapat terealisasi pada bulan Desember.
 - Kurangnya kemampuan SDM pada saat proses pengadaan menggunakan e-katalog sehingga kegiatan pengadaan yang seharusnya dilaksanakan di tribulan II sehingga tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target anggaran kas yang telah ditetapkan.
 - Faktor pendorong terpenuhinya atau melebihi target program/kegiatan antara lain :
 - Adanya pembinaan kelompok lumbung pangan/PUPM/TTI
 - Adanya pembinaa penganekaragaman pangan B2SA
 - Adanya pembinaan P2L (Pekarangan Pangan Lestari)
 - Adanya pembinaan mutu keamanan pangan
 - Adanya pemutakhiran peta kerentanan pangan
 - Adanya stimulant berupa hibah sarana prasarana kepada kelompok
 - Adanya pembuatan dokumen ketahanan pangan (Dokumen PPH, SKPG, NBM)
 - Adanya monitoring dan pendataan harga dan pasokan pangan secara rutin
 - Adanya uji pangan segar untuk mengetahui tingkat keamanan terhadap pangan/bahan pangan yang beredar di masyarakat

- Adanya pendataan produksi ikan secara kontinyu
- Adanya monitoring penyakit ikan secara kontinyu
- Adanya bimtek perikanan baik budidaya, perbenihan, penangkapan maupun hama penyakit ikan
- Adanya bimtek pengolahan hasil perikanan
- Adanya kegiatan Sosialisasi Gemarikan
- Adanya fasilitasi hibah sarana budidaya, perbenihan, tangkap
- Adanya restocking ikan di PUD (Perairan Umum Daratan)

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

- Fasilitasi hibah sarana budidaya, sarana perbenihan dan sarana perikanan tangkap bagi pembudidaya, pembenih dan nelayan dapat mendukung peningkatan produksi perikanan
- Fasilitasi sarana dan prasarana lumbung pangan dapat mendukung pengembangan kegiatan penyisihan cadangan pangan pada kelompok lumbung
- Adanya kelompok lumbung yang aktif dan baik akan mendukung ketersediaan cadangan pangan masyarakat.
- Survey konsumsi pangan berbasis Skor Pola Pangan Harapan (PPH), data baku pangan serta Neraca Bahan Makanan (NBM) dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan program Ketahanan Pangan
- Adanya gelar pangan B2SA dan pelatihan olahan pangan lokal perlu ditingkatkan untuk mendukung penganekaragaman dan olahan pangan lokal yang berkualitas dan terjangkau
- Adanya informasi data produksi perikanan budidaya dan tangkap serta data kelompok perikanan dapat digunakan untuk mengukur potensi pengembangan perikanan di Kabupaten Jombang
- Kegiatan pelatihan/ bimtek dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kelompok lumbung, kelompok PUPM/TTI, pembudidaya, pembenih, nelayan, pengolah pangan lokal maupun poklhasar

3. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja :
 1. Meningkatkan penganggaran untuk kegiatan pelatihan/bimtek sebagai bekal wawasan dan ketrampilan bagi masyarakat sehingga masyarakat mampu menciptakan lapangan usaha baru dan tidak bergantung pada pemberian bantuan hibah
 2. Meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran program/kegiatan secara matang dan terpadu
 3. Meningkatkan kapasitas SDM menyesuaikan dengan penggunaan system pengadaan elektronik
 4. Kegiatan monitoring terhadap hibah yang dibantukan pada masyarakat harus betul-betul dilaksanakan secara rutin
 5. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan pekerjaan untuk mengetahui bahwa setiap kegiatan telah dilaksanakan sesuai aturan dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai narasumber.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang sampai dengan tahun 2023 tersaji pada tabel 2.1 (pada lampiran)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Keberhasilan pembangunan di bidang ketahanan pangan dan perikanan dapat dilihat dengan adanya sinergi antara pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah. Berbagai kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan pembangunan nasional dan pembangunan daerah provinsi dan pembangunan daerah kabupaten/kota, meskipun dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Melihat kondisi tersebut di atas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang selaku Dinas Teknis mencoba untuk mensinergikan pembangunan baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten dalam rangka :

1. Mendukung pembangunan yang sinergis antara pusat, provinsi dan daerah.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keberlangsungan ketersediaan pangan pemerintah dan masyarakat dan peningkatan produksi seluruh komoditi perikanan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat (kelompok lumbung pangan masyarakat, kelompok olahan pangan, kelompok pembudidaya ikan, kelompok pembenih, nelayan, kelompok pengolah hasil perikanan, IKM perikanan, pondok pesantren, pedagang ecer dan grosir (bahan pangan strategis), penggilingan, pelajar, ibu-ibu PKK, organisasi wanita.
5. Menjamin terwujudnya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Kinerja pelayanan perangkat daerah yang merupakan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat
2. Meningkatnya produksi perikanan
3. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator IKU (Indikator Kinerja Utama) Indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Keberhasilan kinerja dinas dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut Ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Jombang

| NO | Indikator | SPM/ NSPK/ SDG's | IKK | Realisasi Renstra PD | | | | Target Renstra PD | Keterangan |
|--------------------------------|---|------------------------|-----|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| URUSAN KETAHANAN PANGAN | | | | | | | | | |
| 1. | Skor Pola Pangan Harapan | | | 88,2 | 83,2 | 85,06 | 87.43 | 85,39 | Dokumen PPH Kab. Jombang (Kegiatan Survey Konsumsi berbasis Pola Pangan Harapan) |
| 2. | Prosentase Peningkatan Cadangan Pangan Masyarakat | | | 16,39 | 20,10 | 20,07 | N/A | NA | |
| 3 | Persentase Cadangan Pangan Masyarakat | | | NA | NA | NA | 0,60 | 0,70 | Target jumlah CPM yang ingin dicapai _____ X100% Target CPM ideal |
| 4 | Persentase Capaian Konsumsi Pangan terhadap AKG | | | NA | NA | Energi 85,93 %, Protein 101,75% | Energi 92.24 %, Protein 103.25% | Energi 89,07 %, Protein 100% | a. Tingkat target capaian konsumsi Energi = AKE _____ X 100% AKE (WNPG) b. Tingkat target capaian konsumsi Protein = AKP _____ X 100% AKP (WNPG) |

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| NO | Indikator | SPM/ NSPK/ SDG's | IKK | Realisasi Renstra PD | | | | Target Renstra PD | Keterangan |
|-------------------------|---|------------------------|-----|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| 5 | Persentase Desa Sangat Tahan Pangan | | | NA | NA | 96,08 % | 94 % | 100 % | Jumlah total Desa sangat tahan pangan pada th.n _____ X 100 % Jumlah total Desa yang ada di Kabupaten Jombang |
| 6 | Persentase Desa Rentan Rawan Pangan | | | NA | NA | NA | 0 % | 0% | Diharapkan tidak ada desa rentan rawan pangan |
| 7 | Prosentase Sampel Uji Yang Aman | | | NA | NA | 96,67 % | NA | NA | |
| 8 | Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan Mutu dan Keamanan | | | NA | NA | NA | 98 % | 99,5 % | (Jumlah sampel yang diuji-Jumlah sampel yg tdk aman) / jumlah total sampel x 100% |
| URUSAN PERIKANAN | | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan Produksi Ikan (%) | | | 0,32 % | 0,10% | 0,17% | 0,18% | 0,19% | (Jumlah Prod.Ikan TB Th.n)-Jumlah Prod.Ikan TB th n-1/ Jumlah Prod.Ikan TB th.n-1 x 100% |
| 2 | Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Rupiah) | | | 1.018.969.172 | 1.065.561.650 | 1.195.868.500 | 1.077.162.555 | 1.209.412.473 | NT= Nilai Produk Olahan - Nilai produksi perikanan segar |
| 3 | Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan | | | 0,32% | 0,10 % | 0,17% | 0,18% | 0,19% | Jumlah Produksi Perikanan th n.- (th.n-1)/(th.n-1)x100 % |

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD maupun hasil kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra PD, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, antara lain :

1. Belum optimalnya cadangan pangan masyarakat
2. Belum adanya cadangan pangan pemerintah
3. Peran kelembagaan distribusi pangan belum optimal
4. Masih adanya desa rawan pangan
5. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pangan yang B2SA
6. Rendahnya publikasi tentang pangan B2SA
7. Standarisasi produk, packaging maupun kualitas produk olahan pangan lokal kurang optimal
8. Adanya peredaran produk pangan segar yang mengandung cemaran
9. Kelembagaan kelompok perikanan optimal
10. Sosialisasi/kampanye Gemarikan belum optimal
11. Produksi olahan hasil perikanan masih rendah
12. Kebutuhan benih ikan yang berkualitas masih cukup tinggi
13. Produksi Perikanan mengalami penurunan
14. Penanganan penyakit ikan belum optimal

Permasalahan diatas merupakan tanggung jawab bersama yang harus segera ditindaklanjuti mengingat saat ini adanya perdagangan bebas dimana produk-produk asing begitu mudahnya masuk ke Indonesia berdampak pada makin meningkatnya akses produk- produk asing terhadap pasar dalam negeri sehingga munculnya persaingan produk pangan maupun produk perikanan yang semakin ketat. Dengan demikian seluruh Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas harus mampu mengatasi semua permasalahan yang sedang terjadi.

Tantangan yang perlu diatasi dan diantisipasi dalam Pembangunan Sektor Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah :

1. Masih adanya penggunaan bahan kimia yang berpengaruh pada keamanan pangan sehingga masih terdapat produk pangan segar asal tumbuhan yang tidak aman untuk dikonsumsi
2. Pola konsumsi masyarakat masih tergantung pada salah satu komoditi yaitu beras/padi sehingga masyarakat masih cenderung sulit merubah pola makan dengan pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal
3. Bertambahnya jumlah penduduk berdampak pada peningkatan kebutuhan bahan pangan.
4. Kegiatan penyisihan cadangan pangan masih belum optimal terutama untuk daerah-daerah yang surplus padi
5. Pergeseran kebiasaan dan pola makan karena pengaruh globalisasi dan ragam aktivitas masyarakat sehingga minat masyarakat terhadap produk pangan berbasis sumberdaya lokal masih rendah.
6. Munculnya desa rawan pangan, pasca pandemi Covid 19 menyebabkan peluang munculnya desa rawan pangan, hal ini merupakan dampak dari penurunan tingkat ekonomi masyarakat, kemiskinan bertambah, mengakibatkan daya beli masyarakat berkurang, keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan serta keterbatasan aset dan akses terhadap sumber daya untuk mengembangkan usaha mikro. Hal ini perlu pemantapan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga yaitu membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat agar mampu mengatasi masalah pangan yang terjadi baik di dalam rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat di sekitarnya.
7. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas pelaku usaha perikanan baik di bidang penangkapan, budidaya dan pengolahan hasil perikanan.
8. Tidak meratanya kemampuan petani ikan/kelompok (penerima bantuan) dalam mengelola, memanfaatkan dan mengembangkan paket bantuan yang diperoleh secara optimal
9. Ketergantungan petani/Pembudidaya Ikan terhadap pakan pabrikan yang harganya semakin meningkat setiap tahun sehingga berpengaruh pada biaya produksi dan pendapatan.

Peluang dan potensi yang mendukung peningkatan pelayanan di bidang ketahanan pangan dan perikanan, antara lain :

1. Jumlah penduduk yang cukup banyak merupakan pasar produk pangan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat
2. Perkembangan teknologi informasi merupakan sarana efektif dalam mendukung pemasaran produk pangan dan perikanan

3. Adanya kelompok lumbung pangan Masyarakat dan kelompok olahan pangan
4. Adanya sumber daya alam yang belum termanfaatkan secara optimal terutama sumber pangan lokal sehingga nilai ekonomisnya masih rendah
5. Kemajuan teknologi dan informasi serta tumbuhnya organisasi masyarakat sebagai infrastruktur sosial mendukung peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebutuhan makanan yang B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman)
6. Meningkatnya permintaan akan produk perikanan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan bagi Kesehatan
7. Adanya pembudidaya ikan yang jumlahnya masih cukup besar akan mendukung peningkatan produksi perikanan
8. Minat masyarakat untuk melaksanakan kegiatan usaha perikanan baik itu pembenihan, budidaya maupun pengolahan masih cukup tinggi
9. Minimnya jumlah kelompok usaha pengolahan dan pemasar hasil perikanan

Dari uraian singkat sebagaimana tersebut di atas isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti yang menjadi bagian tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan peran dan fungsi kelompok lumbung

Dari 375 kelompok lumbung yang teregister di dinas sampai dengan tahun 2023 terdapat sebanyak 269 kelompok yang aktif sedangkan 106 kelompok sudah tidak aktif karena kelompok sudah tidak ada atau terdapat kelompok tetapi kegiatan usaha sudah tidak berjalan. Permasalahan yang dihadapi adalah tidak semua kelompok lumbung aktif atau kurangnya kesadaran kelompok dalam kegiatan penyisihan cadangan pangan, manajemen kelembagaan kelompok lumbung masih belum optimal sehingga pemanfaatan bantuan baik berupa pembangunan Gudang lumbung, pembangunan lantai jemur maupun sarana prasarana infrastruktur lumbung pangan tidak maksimal, dorongan kebutuhan ekonomi sehingga hasil panen cenderung untuk langsung dijual karena dengan tunda jual dikhawatirkan harga akan turun atau gabah yang disimpan dalam waktu lama akan rusak.

2. Peningkatan penanganan kerawanan pangan

Desa diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa di

Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi. Hasil analisis FSVA 2022 menunjukkan bahwa desa rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 18 desa dari 306 desa (2,24%) yang terdiri dari 1 desa (0,33%) Prioritas 1 (Desa Klitih Kec. Plandaan); 3 desa (0,98%) Prioritas 2 (Desa Jiporapah dan Kampungbaru Kec. Plandaan dan Desa Wonomerto Kec. Wonosalam); dan 14 desa (4,57%) prioritas 3. Sedangkan 288 desa (94,11%) tergolong dalam prioritas 4-6, dengan rincian 139 desa (45,42%) prioritas 4, 133 desa (43,46%) prioritas 5 dan 16 desa (5,22%) prioritas 6.

3. Peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang B2SA Tahun 2022 ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai makanan pokok masih cukup tinggi yaitu sebesar 109,61 kg/kap/th sehingga perlu edukasi yang massive dan terus-menerus kepada masyarakat terkait penganeekaragaman konsumsi pangan yang B2SA artinya pola konsumsi masyarakat perlahan-lahan bisa dirubah tidak hanya mengkonsumsi beras sebagai satu-satunya sumber karbohidrat serta perlu peningkatan sosialisasi kepada masyarakat untuk konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, sayur dan buah, selain itu perlu juga peningkatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan
4. Daya Saing produk olahan pangan berbasis sumberdaya lokal masih lemah Diversifikasi pengolahan pangan perlu diimbangi dengan pengembangan produk pangan menggunakan teknologi pengolahan yang tepat, serta packaging yang kurang menarik
5. Produk pangan segar asal tumbuhan masih rawan cemaran pestisida/bahan kimia
6. Tingginya biaya produksi terutama kebutuhan untuk biaya pakan hampir 80 % tidak diikuti dengan peningkatan harga jual hasil panen secara significant
7. Kurangnya daya saing produk olahan hasil perikanan, baik dari segi jenis dan packaging

Pelayanan SKPD

Sesuai dengan PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, bahwa Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan

menyejahterakan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam hal ini melaksanakan urusan wajib dan pilihan. Urusan Wajib untuk Ketahanan Pangan dan Urusan Pilihan untuk Perikanan. Urusan Wajib merupakan Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang bertugas untuk menyelenggarakan urusan bidang ketahanan pangan serta kelautan dan perikanan sebagaimana yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Jombang.

- **Pelayanan Publik Dibidang Ketahanan Pangan, dilakukan dengan :**

- Melaksanakan Pembinaan kelompok lumbung, kelompok distribusi pangan serta Pembinaan Penganekaragaman Konsumsi dan Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan
- Pemberian bantuan/hibah sarpras lumbung, bantuan alat olahan pangan serta bantuan untuk pemanfaatan lahan pekarangan agar mampu mendukung pengembangan usaha dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan.

- **Pelayanan Publik di bidang Perikanan, dilakukan dengan :**

- Melaksanakan Pelatihan/bimbingan teknis baik perbenihan, budidaya, tangkap maupun pengolahan pasca panen hasil perikanan
- Pemberian hibah/bantuan dalam rangka stimulasi bagi para pembudidaya, pembenih, nelayan agar mampu mengembangkan usahanya
- Pemberian hibah sarana budidaya ikan bagi Pondok Pesantren
- Pelayanan usaha pemanfaatan aset daerah melalui penjualan benih maupun penjualan ikan dari kegiatan pembesaran ikan di Kolam SAP (Sentra Aquabis Perikanan) sehingga hal ini berdampak pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022 sebagai berikut :

| No. | Uraian | Target Th. 2022 | Realisasi Th. 2022 |
|-----|---|-----------------|--------------------|
| 1. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | Rp.80.000.000,- | Rp.100.469.500,- |

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Penjualan Hasil Perikanan | Rp.80.000.000,- | Rp.100.469.500,- |
| - UPT | Rp. 40.000.000,- | Rp. 55.098.000,- |
| - Sentra Aquabis Perikanan | Rp. 40.000.000,- | Rp. 45.371.500,- |

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Penyesuaian RKPD dimulai dari pencermatan terhadap rancangan awal RKPD urusan Ketahanan pangan dan Perikanan. Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Dengan demikian rancangan awal RKPD yang telah dibuat oleh dinas bisa terjadi perubahan (penambahan/pengurangan) baik itu pada target, indikator maupun anggaran karena dalam proses perencanaan terdapat kegiatan musrenbang maupun forum opd yang merupakan sarana bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk memberikan saran, masukan bahkan usulan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang. Dan dalam rangka menyaring aspirasi serta program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, unit pelaksana teknis, serta para pemangku kepentingan maka dinas akan melakukan penyesuaian atau analisis terhadap kebutuhan tersebut. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tersaji dalam tabel 2.3 (pada lampiran)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam rangka dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pangan dan perikanan maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menyusun suatu program kegiatan. Penentuan program dan kegiatan berasal dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam

rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musyawarah tersebut berguna untuk menyaring aspirasi dan usulan kegiatan yang menjadi prioritas untuk mengatasi permasalahan yang ada guna memaksimalkan pembangunan melalui program dan kegiatan yang efisien dan tepat sasaran serta didukung masyarakat. Penentuan program dan kegiatan tersebut berdasarkan pada analisis kebutuhan dan anggaran

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2024 disusun dengan mengacu pada RKPDP Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Beberapa usulan program dan kegiatan masyarakat berkaitan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Kelompok lumbung melalui penyediaan infrastruktur lumbung pangan dan pembinaan kelompok
2. Pemberdayaan kelompok budidaya ikan, UPR, Nelayan, Pondok Pesantren melalui penyediaan sarana prasarana usaha budidaya ikan, sarana perbenihan dan sarana tangkap serta peningkatan pembinaan teknis
3. Pelatihan Olahan Pangan dan gelar produk pangan lokal ditingkatkan
4. Pelatihan Olahan Hasil Perikanan ditingkatkan
5. Peningkatan pemasaran produk olahan melalui fasilitasi pameran-pameran

Usulan program dan kegiatan berasal dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi. Kegiatan musyawarah yang diawali dari musrenbang tingkat desa kemudian kecamatan akan menghasilkan rumusan usulan-usulan dimana usulan dari Musrenbang tingkat kecamatan tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim teknis OPD untuk diverifikasi kelayakan baik dari sisi administrasi maupun secara teknis dan hasilnya akan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas. Forum Perangkat daerah dilaksanakan selain untuk pembahasan usulan prioritas kecamatan juga dilakukan guna menyaring aspirasi dan usulan kegiatan yang menjadi prioritas OPD dalam rangka menjawab isu-isu penting /permasalahan yang ada guna memaksimalkan pembangunan bidang ketahanan pangan dan perikanan melalui program kegiatan dan sub kegiatan yang efisien dan tepat sasaran.

Rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023 dibahas dalam forum Renja OPD yang dihadiri oleh delegasi dari kecamatan,

stake holder maupun OPD terkait lainnya. Tujuan pembahasan Rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan, penajaman indikator dan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, serta penyesuaian pendanaan program dan kegiatan berdasarkan pagu indikatif Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Jombang

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|--|--|--|---|---------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Kegiatan Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Dsn.Jabon, Ds.Klitih, Kec.Plandaan | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia | 4.000 Kg (Gabah Isi Lumbung) | |
| Dsn.Sumberpelas, Ds.Plabuhan, Kec.Plandaan | | 4.000 Kg (Gabah Isi Lumbung) | | | |
| Dsn.Mabul, Ds.Sidokaton, Kec.Kudu | | 4.000 Kg (Gabah Isi Lumbung) | | | |
| Ds.Jatiduwur, Kec.Kesamben | | 4.000 Kg (Gabah Isi Lumbung) | | | |
| Dsn.Ngulaan, Ds.Darurejo, kec.Plandaan | | 4.000 Kg (Gabah Isi Lumbung) | | | |
| Ds.Marmoyo, Kec.Kabuh | | 4.000 Kg (Gabah Isi Lumbung) | | | |
| Dsn.Ngembak, Ds.Made, Kec.Kudu | | 4.000 Kg (Gabah Isi Lumbung) | | | |
| Dsn.Tawang, Ds.Made, Kec.Kudu | | 4.000 Kg (Gabah Isi Lumbung) | | | |
| Dsn.Made, Ds.Made, Kec.Kudu | | 4.000 Kg (Gabah Isi Lumbung) | | | |
| Dsn.Ngembak, Ds.Made, Kec.Kudu | | 1 Unit Timbangan Duduk | | | |
| Dsn.Tawang, Ds.Made, Kec.Kudu | | 1 Unit Timbangan Duduk | | | |
| Dsn.Made, Ds.Made, Kec.Kudu | | 1 Unit Timbangan Duduk | | | |

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|----|---|-----------------------------------|---|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Dsn.Waru, Ds.Made, Kec.Kudu | | 1 Unit RMU | |
| 2. | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Kegiatan Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sugai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap | Ds. Turipinggir Kec. Megaluh | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | 10 paket (Sarpras Alat Tangkap Ramah lingkungan) | |
| 3. | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Kegiatan Pengelolaan pembudidayaan ikan Sub Kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Ds. Pagerwojo Kec. Perak | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Paket Sarpras Budidaya Perikanan | |
| | | Ds. Badang, Kec. Ngoro | | 1 Paket Sarpras Budidaya Perikanan | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan dalam RPJMN (2020-2024) diarahkan untuk Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sedangkan tema RKP tahun 2023 yaitu “Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan Sumber Daya Manusia Unggul,” Dalam rangka menyukseskan RPJMN 2020-2024, pemerintah perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang dilaksanakan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan tersebut menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan pembangunan termasuk didalamnya adalah kebijakan pada sektor pangan maupun perikanan.

Arah kebijakan nasional dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi terkait urusan pangan adalah **“Peningkatan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”** dengan menitik beratkan pada upaya-upaya yang harus dilaksanakan oleh Sektor Pangan untuk tetap menjaga ketersediaan pangan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui beberapa strategi, antara lain :

1. Peningkatan Konsumsi Pangan B2SA
2. Peningkatan Keamanan Pangan
3. Peningkatan Akses Pangan
4. Penanganan Kerawanan Pangan

Sedangkan kebijakan nasional terkait urusan perikanan antara lain **“Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional”** dan **“Peningkatan Daya Saing, Pengembangan Inovasi dan Riset KP serta Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP ”** yang dilaksanakan melalui strategi antara lain :

1. Akselerasi peningkatan produksi aquaculture/perikanan budidaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan budidaya

2. Pengembangan komoditas perikanan budidaya yang memiliki nilai ekonomis penting di semua tipologi ekosistem yaitu laut, payau, dan tawar untuk pemenuhan konsumsi domestik, sumber devisa negara dan keberlanjutan lingkungan
3. Pengembangan pakan ikan mandiri yang terdiri dari pakan buatan dan pakan alami
4. Pengembangan sistem perbenihan ikan nasional melalui penguatan jejaring atau sistem logistik perbenihan nasional, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana balai benih ikan, unit perbenihan ikan di masyarakat, dan broodstock center, serta modernisasi teknologi
5. Pengembangan kawasan kluster usaha budidaya ikan yang berkelanjutan termasuk di kawasan minapolitan dan SKPT didukung dengan manajemen pengelolaan yang terintegrasi dan modern
6. Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan kawasan perikanan budidaya yang dilakukan antara lain melalui surveillance hama dan penyakit ikan, pengujian residu produk perikanan budidaya, modernisasi sarana laboratorium, dan pembangunan pusat kesehatan ikan terpadu
7. Pengembangan dan pelaksanaan sertifikasi perikanan budidaya di bidang pembesaran, pembenihan, dan pakan
8. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan pembudi daya ikan melalui pemberian stimulus usaha, fasilitasi skema pembiayaan yang murah dan mudah, sertifikasi lahan, asuransi usaha perikanan budidaya, serta pendampingan teknis
9. Peningkatan kualitas, kapasitas, dan produktivitas industri pengolahan ikan/udang, dan rumput laut
10. Peningkatan standardisasi, ketelusuran (traceability), jaminan mutu, dan keamanan produk kelautan dan perikanan
11. Pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan dan penguatan daya saing Unit Pengolahan Ikan (UPI)
12. Pelaksanaan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat dalam rangka mengatasi stunting
13. Peningkatan ragam baru (diversifikasi) produk hasil kelautan dan perikanan
14. Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui pengembangan kawasan usaha

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang berupaya untuk menselaraskan tujuan maupun sasaran agar berkesinambungan dengan program pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

3.2. Tujuan & Sasaran OPD Tahun 2022

Tujuan ke-1 adalah “Meningkatkan Jumlah, Kualitas dan Akses Pangan Masyarakat ” dengan Sasaran Strategis yaitu “**Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat**” dengan indikator sasaran “*Skor Pola Pangan Harapan*”.

Tujuan ke-2 adalah “Meningkatkan PDRB Sektor Perikanan” dengan Sasaran strategis yaitu “**Meningkatnya produksi perikanan**” dengan indikator sasaran “*Persentase pertumbuhan produksi ikan*”.

Tujuan ke-3 adalah “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi” dengan Sasaran strategis yaitu “**Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah**” dengan indikator sasaran “*Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah*”.

3.3 Program & Kegiatan OPD Tahun 2024

Program pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2024 pada dasarnya melanjutkan program tahun sebelumnya dan sesuai dengan Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang yaitu “**Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan SDM Unggul**” dan mendukung prioritas 3 yaitu “*Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung Peningkatan Investasi, Daya Saing dan Produk Unggulan Daerah*”. Program kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan masih dalam rangka mendukung program pemerintah dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi akibat adanya Pandemi Covid 19 yang telah melanda sejak tahun 2020 dan masih berlangsung sampai dengan saat ini. Dampak paling nyata dari pandemi Covid 19 adalah adanya resesi ekonomi dimana terjadi peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Terkait dengan hal itu, sektor pertanian/pangan, perikanan, dan industri pengolahan diharapkan akan dapat diandalkan untuk mendorong pemulihan perekonomian. Sebagai bagian dari upaya mendukung pemulihan ekonomi, sektor pangan bisa menjadi salah satu tumpuan. Sektor ini tidak terdampak besar karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang selalu dibutuhkan, meskipun ekonomi sedang krisis. Bahkan, dalam situasi sekarang, sektor pangan semakin strategis. Sebab, jika pangan tidak tercukupi dikhawatirkan berpotensi mengganggu stabilitas. Sedangkan sektor perikanan meskipun menjadi salah satu sektor yang terdampak Covid 19 diharapkan pada tahun 2024 mampu pulih, terus tumbuh dan berkembang sehingga bisa menjadi salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.

a. **Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap Usulan Program dan Kegiatan diantaranya terkait dengan :**

- Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dilaksanakan dalam upaya mencapai tema Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan untuk Tahun 2024.
- Program dan kegiatan juga untuk mendukung tercapainya salah satu tujuan dari 17 tujuan dalam SDG's (Sustainable Development Goals/Pembangunan Berkelanjutan) yaitu tujuan ke-2 artinya yaitu Tanpa kelaparan (Zero hunger) yaitu Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan. Upaya yang dilaksanakan adalah Penguatan cadangan pangan masyarakat, peningkatan produksi perikanan, penganeekaragaman pangan lokal maupun olahan hasil perikanan, pemberian bantuan pangan untuk siswa sekolah dan keluarga rawan pangan, optimalisasi lahan pekarangan dan sosialisasi Gemarikan.
- Disamping itu program/ kegiatan/ sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang bertujuan pula untuk “pemberdayaan masyarakat” guna mengatasi pengangguran pasca pandemi Covid 19. Pemberdayaan dilakukan melalui program/ kegiatan/ sub kegiatan yang berupa peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) yaitu pelatihan/bimtek maupun fasilitasi hibah sarana prasarana usaha dengan sasaran :
 1. **Kelompok lumbung** maka diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas kelembagaan kelompok lumbung sehingga mampu mendukung cadangan pangan masyarakat kabupaten Jombang.
 2. **Kelompok Pengolahan Pangan** maka diharapkan akan dapat mendorong pengembangan usaha olahan pangan berbahan baku lokal.
 3. **Kelompok Pembudidaya Ikan** maka diharapkan akan dapat mendorong pengembangan usaha perikanan baik budidaya maupun pembenihan sehingga dapat meningkatkan produksi perikanan di kabupaten Jombang.
 4. **Nelayan di perairan umum** maka diharapkan akan dapat mengurangi penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, menjaga keseimbangan sumber daya perairan dan mendorong peningkatan produksi ikan hasil tangap.
 5. **Pondok Pesantren** maka diharapkan akan dapat memberikan bekal kewirausahaan perikanan dikalangan santri sehingga dapat

meningkatkan pengetahuan para santri sekaligus turut mendukung salah satu program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu “One Pesantren One Product”

- Program dan kegiatan merupakan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun lalu agar pada tahun mendatang seluruh target dapat tercapai secara maksimal.

b. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang

Pada tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan perikanan akan melaksanakan sebanyak 8 (delapan) Program dan 18 (delapan belas) kegiatan serta 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dengan sumber dana berasal dari APBD II. Yang menjadi lokasi dari program dan kegiatan adalah wilayah di kabupaten Jombang yang memiliki potensi baik itu potensi pengembangan lumbung pangan, potensi perikanan maupun potensi pengolahan pangan dan ikan sedangkan yang menjadi sasaran antara lain kelompok lumbung, petani ikan, poklamsar, pondok pesantren, kelompok wanita tani, ibu-ibu PKK, pelajar. Pada tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang melaksanakan program dan kegiatan mandatori Kabupaten Jombang, yaitu Desa Mandiri Pangan (DeMaPan) dilakukan pada dua (2) desa *pilot project* yaitu Desa Made, Kec Kudu dan Desa Wonosalam, Kec Wonosalam. Program Demapan bertujuan untuk mewujudkan kemandirian pangan wilayah, sehingga jika terjadi kondisi darurat seperti Pandemi Covid 19 seperti yang lalu, ataupun bencana alam, kebutuhan pangan Masyarakat Kabupaten Jombang tidak akan terganggu. Program Desa Mandiri Pangan ini tidak diampu secara mandiri oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, melainkan kolaborasi dari perangkat daerah, stakeholder dan organisasi yang lain. Selain itu juga menginisiasi aplikasi pelayanan untuk bidang ketahanan pangan, sehingga dapat tersaji data ketersediaan bahan pangan dan harga pangan untuk wilayah secara *real time* serta *update*. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. **PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah kabupaten/Kota Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Kelembagaan distribusi pangan

2. **PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan
 - b. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi
3. **PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan
 - b. Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota
4. **PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**, dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar Daerah Kabupaten/Kota
5. **PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** dengan kegiatan :
 - a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sugai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
6. **PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** dengan kegiatan :
 - a. Pemberdayaan pembudidayaan ikan kecil
 - b. Pengelolaan pembudidaya ikan
7. **PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan dan penyaluran bahan baku industry pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
8. **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA** dengan kegiatan antara lain :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
 - b. Administrasi, Keuangan perangkat Daerah
 - c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - d. Administrasi umum perangkat Daerah
 - e. Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah

- g. Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah

Adapun tabel rencana program dan kegiatan tahun 2024 serta prakiraan maju tahun 2025 tersaji dalam lampiran tabel 3.1

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan sebagai upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang dan mengacu pada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Penyusunan rencana kerja bukan kegiatan yang berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian atau proses kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD, dengan demikian program dan kegiatan yang ada pada dokumen perencanaan diatur dan dijelaskan secara rinci dalam rencana kerja (Renja).

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam lampiran Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan

| KODE | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|-------------------|---|---|--|-------------------|--------|----------------|-----------|---|
| | | | Target 2024 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | |
| | | | | | | | Nasional | Daerah |
| 2.09.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR | 100% | 5,604,500,432 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan | 100% | 16,424,800 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.01.2.01.0001 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 6,871,200 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.01.2.01.0006 | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | 9,553,600 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| KODE | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|-------------------|--|---|--|-------------------|--------|----------------|-----------|---|
| | | | Target 2024 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | |
| | | | | | | | Nasional | Daerah |
| 2.09.01.2.02 | Administrasi, Keuangan perangkat Daerah | Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | 100% | 4,733,270,657 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.01.2.02.0001 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 28 Orang/Bulan | 4,588,808,007 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.01.2.02.0003 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | 141,210,000 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.01.2.02.0004 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1,048,750 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| KODE | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--------------------|--------|----------------|-----------|---|
| | | | Target 2024 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | |
| | | | | | | | Nasional | Daerah |
| 2.09.01.2.02.0007 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 2,203,900 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2 09 01 2.05 | Administrasi kepegawaian perangkat Daerah | Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 100% | 14,400,000 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.01.2.05.0002 | Pengadaan pakain Dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan | 24 Paket | 14,400,000 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.01.2.06 | Administrasi umum perangkat Daerah | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 271,672,525 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| KODE | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|-------------------|--|--|--|-------------------|--------|----------------|-----------|---|
| | | | Target 2024 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | |
| | | | | | | | Nasional | Daerah |
| 2.09.01.2.06.0001 | Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 4,267,700 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.01.2.06.0002 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 34,422,275 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.01.2.06.0003 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | 4,606,950 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.01.2.06.0004 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 123,680,000 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| KODE | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|-------------------|--|--|--|-------------------|--------|----------------|-----------|---|
| | | | Target 2024 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | |
| | | | | | | | Nasional | Daerah |
| 2.09.01.2.06.0005 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 9,161,600 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.01.2.06.0006 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 28,352,000 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 Laporan | 67,182,000 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| KODE | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|-------------------|--|--|--|-------------------|--------|----------------|-----------|---|
| | | | Target 2024 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | |
| | | | | | | | Nasional | Daerah |
| 2.09.01.2.07 | Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah | Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 10,000,000 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.01.2.07.0010 | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 10,000,000 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.01.2.08 | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 392,400,000 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.01.2.08.0002 | Penyediaan jasa komunikasi sumber Daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 162,000,000 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| KODE | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--------------------|--------|----------------|-----------|---|
| | | | Target 2024 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | |
| | | | | | | | Nasional | Daerah |
| 2.09.01.2.08.0004 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 230,400,000 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.01.2.09 | Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah | Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik | 100% | 166,332,450 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.01.2.09.0001 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 40,110,000 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.01.2.09.0002 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 36 Unit | 60,812,550 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| KODE | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--------------------|--------|----------------|-----------|---|
| | | | Target 2024 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | |
| | | | | | | | Nasional | Daerah |
| 2.09.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 29,519,900 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 81 Unit | 35,890,000 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | PERSENTASE CADANGAN PANGAN MASYARAKAT | 0.85% | 581,091,400 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.02.2.01 | Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah kabupaten/Kota | Jumlah cadangan pangan masyarakat | 1.476 Kg/Tribulan | 581,091,400 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| KODE | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|-------------------|--|--|--|----------------------|--------|----------------|-----------|---|
| | | | Target 2024 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | |
| | | | | | | | Nasional | Daerah |
| 2.09.02.2.01.0003 | Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia | 3 Unit | 581,091,400 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIVIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | PERSENTASE CAPAIAN KONSUMSI PANGAN TERHADAP AKG (Energi) | 88,34% (Energi) | 1,018,061,150 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| | | PERSENTASE CAPAIAN KONSUMSI PANGAN TERHADAP AKG (Protein) | 100 % (Protein) | | | | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan | Tingkat Stabilitas Harga Pangan Strategis | 4% | 782,265,750 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| KODE | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|-------------------|---|--|--|-------------------|--------|----------------|-----------|---|
| | | | Target 2024 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | |
| | | | | | | | Nasional | Daerah |
| 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | 13 dokumen | 117,525,750 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.03.2.01.0003 | Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 2 Laporan | 354,101,550 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.03.2.01.0015 | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan | Informasi Harga dan Pasokan Pangan | 12 Dokumen | 115,148,700 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.03.2.01.0006 | Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia | Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan | 27 Unit | 40,082,400 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| KODE | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|--|---|--|--|----------------------------------|--------|-------------------------|-----------|--|
| | | | Target 2024 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | |
| | | | | | | | Nasional | Daerah |
| 2.09.03.2.01.0007 | Peningkatan ketahanan pangan keluarga | Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga | 140 Keluarga | 155,407,350 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.03.2.04 2.09.03.2.04.0001 | Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun | Angka Konsumsi Pangan pada Wilayah dengan Skor PPH Ideal Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | 13 Kecamatan 1 Dokumen | 235,795,400 70,795,400 | | APBD APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 5 Laporan | 165,000,000 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| KODE | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|-------------------|--|---|--|-------------------|--------|----------------|-----------|---|
| | | | Target 2024 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | |
| | | | | | | | Nasional | Daerah |
| 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | PERSENTASE DESA RENTAN RAWAN PANGAN | 0% | 173,838,200 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.04.2.01 | Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan | Dokumen analisa hasil pemuktahiran peta kerentanan dan ketahanan pangan | 1 Dokumen | 85,000,000 | | | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | 1 Dokumen | 85,000,000 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.04.2.02 | Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota | Jumlah Desa rawan pangan yang ditangani | 6 Desa | 88,838,200 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| KODE | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|---------------------|---|---|--|-------------------|--------|----------------|-----------|---|
| | | | Target 2024 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | |
| | | | | | | | Nasional | Daerah |
| 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota | 6 Laporan | 88,838,200 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | PERSENTASE SAMPEL UJI YANG AMAN | 98.33% | 79,000,000 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan uji pangan segar asal tumbuhan yang ditindak lanjuti | 63 Rekomendasi | 79,000,000 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 2.09.05.2.01.0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 27,000,000 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| KODE | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|-------------------|--|--|--|-------------------|--------|----------------|-----------|---|
| | | | Target 2024 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | |
| | | | | | | | Nasional | Daerah |
| 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | 2 Dokumen | 52,000,000 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | PERSENTASE PERTUMBUHAN PRODUKSI IKAN TANGKAP | 0.14% | 63,020,700 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 3.25.03.2.01 | Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sugai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Produksi perikanan tangkap | 151,21 Ton | 59,117,700 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 3.25.03.2.01.0001 | Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 Dokumen | 3,543,400 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| KODE | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|-------------------|--|--|--|-------------------|--------|----------------|-----------|---|
| | | | Target 2024 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | |
| | | | | | | | Nasional | Daerah |
| 3.25.03.2.01.0003 | Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | 2 Unt | 55,574,300 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase nelayan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan | 1.75% | 3,903,000 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 3.25.03.2.02.0001 | Pengembangan kapasitas nelayan kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya | 10 Orang | 3,903,000 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | PERSENTASE PERTUMBUHAN PRODUKSI IKAN BUDIDAYA | 0.20% | 601,568,933 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| KODE | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|-------------------|---|---|--|-------------------|--------|----------------|-----------|---|
| | | | Target 2024 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | |
| | | | | | | | Nasional | Daerah |
| 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil | Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang meningkat kelas kelompoknya | 22 Kelompok | 99,540,400 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 3.25.04.2.02.0002 | Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudiaya ikan kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | 22 Kelompok | 99,540,400 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 3.25.04.2.04 | Pengelolaan pembudidayaan ikan | Jumlah produksi ikan budidaya | 14.760,26 Ton | 502,028,533 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| | | Jumlah produksi benih ikan di UPT | 432.500 Ekor | | | | | |
| 3.25.04.2.04.0001 | Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 147,335,700 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| KODE | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--------------------|--------|----------------|-----------|---|
| | | | Target 2024 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | |
| | | | | | | | Nasional | Daerah |
| 3.25.04.2.04.0003 | Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 4 Unit | 224,493,133 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 3.25.04.2.04.0004 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | 1 Dokumen | 30,000,000 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 3.25.04.2.04.0005 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat | 160 Orang | 100,199,700 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | NILAI TAMBAH HASIL OLAHAN PERIKANAN | Rp. 1.264.085.793 | 225,228,200 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| KODE | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|-------------------|--|---|--|-------------------|--------|----------------|-----------|---|
| | | | Target 2024 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | |
| | | | | | | | Nasional | Daerah |
| 3.25.06.2.02 | Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah produksi hasil olahan perikanan | 45.079,92 Kg | 225,228,200 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota | Jumlah ketersediaan peningkatan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota (Ton) | 0,6 Ton | 85,000,000 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |
| 3.25.06.2.03.0002 | Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam satu daerah Kab/Kota | 180 Pelaku Usaha | 140,228,200 | | APBD | | Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah |

BAB V PENUTUP

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahunan yang disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan serta mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah Kabupaten Jombang dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Jombang tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2024.

5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dimana Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :

1. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya
2. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, selanjutnya Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Program dan Kegiatan yang rencana dilaksanakan pada tahun 2024 dititik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan dengan disusunnya Rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 ini

efisien serta memaksimalkan capaian kinerja pada masing-masing program untuk mendukung tercapainya target tujuan dan sasaran strategis Ketahanan Pangan dan Perikanan yang telah ditetapkan.

Jombang, 07 Juli 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Ditandatangani secara elektronik



N RD NURKAMALIA, SKM., M.Si.
NIP. 196501011986032036

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|-----------------|--|--|--|---|--|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2.09.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | PERSENTASE PENINGKATAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT | 0 % | 20.07 % | N/A % | N/A % | N/A | N/A % | N/A % | N/A |
| | | Persentase Cadangan Pangan Masyarakat | 0.60 % | N/A % | 0.6 % | 0.6 % | N/A | N/A % | 0.6 % | 100% |
| 2.09.02.2.01 | Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah cadangan pangan masyarakat | 1,060 kg/tribulan | 884 kg/tribulan | 1,060 kg/tribulan | 1060.5 kg/tribulan | 100% | N/A kg/tribulan | 1,060 kg/tribulan | 100% |
| 2.09.02.2.01.01 | Penyediaan infrastruktur lumbung pangan | Jumlah gudang lumbung yang dibangun | 6 Unit | 1 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 100.00 | N/A Unit | 3 Unit | 50% |
| | | Jumlah lantai jemur yang dibangun | 120 M2 | 120 M2 | 0 M2 | 0 M2 | N/A | N/A M2 | 120 M2 | 100% |
| | | Jumlah pengadaan RMU | 1 Unit | 1 Unit | 0 Unit | 0 Unit | N/A | N/A Unit | 1 Unit | 100% |
| | | Jumlah rumah RMU yang dibangun | 1 Unit | 1 Unit | 0 Unit | 0 Unit | N/A | N/A Unit | 1 Unit | 100% |
| 2.09.02.2.01.02 | Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur | Jumlah lantai jemur yang dibangun | 8 Unit | N/A Unit | 2 Unit | 1 Unit | 50.00 | N/A Unit | 1 Unit | 13% |
| 2.09.02.2.01.03 | Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya | Jumlah gabah yang dibantukan pada kelompok lumbung | 166.1 Ton | 0 Ton | 18.67 Ton | 18.67 Ton | 100.00 | N/A Ton | 19 Ton | 11% |
| | | Jumlah sarana yang dibantukan pada kelompok lumbung pangan | 19 Unit | 9 Unit | 3 Unit | 3 Unit | 100.00 | N/A Unit | 12 Unit | 63% |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN | PERSENTASE CAPAIAN KONSUMSI PANGAN TERHADAP AKG | 87,76% (Energi) % | 85.93 % | 87.76 % | 92.24 % | 105.10 | N/A % | 87.76 % | 100% |
| | | | 100% (Protein) % | 101.75 % | 100 % | 103.25 % | 103.25 | N/A % | 100 % | 100% |
| 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan | Tingkat Stabilitas Harga Pangan Strategis | 2 % | 3 % | 3 % | 3 % | 50% | N/A % | 2 % | 100% |
| 2.09.03.2.01.01 | Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan | Jumlah dokumen data baku pangan | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.00 | N/A Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| | | Jumlah dokumen neraca bahan makanan | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.00 | N/A Dokumen | 1 Dokumen | 50% |
| | | Jumlah dokumen SKPG | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.00 | N/A Dokumen | 1 Dokumen | 50% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|-----------------|--|--|--|---|--|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2.09.03.2.01.02 | Penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal | Jumlah bantuan sarpras optimalisasi lahan | 1 Paket | 1 Paket | N/A Paket | N/A Paket | N/A | N/A Paket | 1 Paket | 100% |
| | | Jumlah peserta pembinaan optimalisasi lahan | 25 Peserta | 25 Peserta | N/A Peserta | N/A Peserta | N/A | N/A Peserta | 25 Peserta | 100% |
| 2.09.03.2.01.03 | Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya | Jumlah peserta koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan perberasan | 310 Peserta | 120 Peserta | 210 Peserta | 210 Peserta | 100.00 | N/A Peserta | 330 Peserta | 106% |
| 2.09.03.2.01.04 | Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan | Jumlah dokumen informasi harga pasokan 9 bahan pokok serta akses pangan | 24 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100.00 | N/A Dokumen | 24 Dokumen | 100% |
| 2.09.03.2.01.06 | Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia | Jumlah kelompok lumbung yang dibina | 90 Kelompok lumbung | 30 Kelompok lumbung | 140 Kelompok lumbung | 140 Kelompok lumbung | 100.00 | N/A Kelompok lumbung | 170 Kelompok lumbung | 189% |
| | | Jumlah peserta pembinaan PUPM/TTI | 40 Peserta | 0 Peserta | 30 Peserta | 30 Peserta | 100.00 | N/A Peserta | 30 Peserta | 75% |
| 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi | Angka Konsumsi Pangan | 1,886.86 Kkal/kap/hr | 1,847.5 Kkal/kap/hr | 1886.86 Kkal/kap/hr | 2091.43 Kkal/kap/hr | 110.8% | N/A Kkal/kap/hr | 1,887 Kkal/kap/hr | 100% |
| | | | 57 gr/kap/hr | 58 gr/kap/hr | 57 gr/kap/hr | 58.45 gr/kap/hr | 102.5% | N/A gr/kap/hr | 57 gr/kap/hr | 100% |
| | | Jumlah kelompok P2L yang Aktif | 35 Kelompok | 20 Kelompok | 35 Kelompok | 35 Kelompok | 100% | N/A Kelompok | 35 Kelompok | 100% |
| 2.09.03.2.04.01 | Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun | Jumlah dokumen penetapan target konsumsi pangan berbasis PPH | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.00 | N/A Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| 2.09.03.2.04.02 | Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal | Jumlah kelompok P2L yang dibina | 33 Kelompok P2L | 20 Kelompok P2L | 35 Kelompok P2L | 35 Kelompok P2L | 100.00 | N/A Kelompok P2L | 55 Kelompok P2L | 167% |
| | | Jumlah bantuan P2L dan Pengolahan Pangan | 6 Paket | 5 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100.00 | N/A Paket | 6 Paket | 100% |
| | | Jumlah pelaksanaan lomba cipta menu tingkat provinsi, festival makanan tradisional dan festival makanan khas Daerah se bakorwil bojonegoro | 4 Kali | 1 Kali | 3 Kali | 3 Kali | 100.00 | N/A Kali | 4 Kali | 100% |
| | | Jumlah peserta pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan yang | 130 Peserta | 80 Peserta | 145 Peserta | 145 Peserta | 100.00 | N/A Peserta | 225 Peserta | 173% |
| | | Jumlah peserta pembinaan mutu dan keamanan pangan | 150 Peserta | 70 Peserta | 120 Peserta | 120 Peserta | 100.00 | N/A Peserta | 190 Peserta | 127% |
| | | 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | PERSENTASE DESA SANGAT TAHAN PANGAN | 98.04 % | 96.08 % | 98.04 % | 94 % | 96% | N/A % |
| | | Persentase daerah rentan rawan pangan | 0 % | N/A % | N/A % | N/A % | N/A | N/A % | N/A % | N/A |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|-----------------|--|---|--|---|--|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2.09.04.2.01 | Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan | Dokumen hasil pemutakhiran peta kerentanan dan ketahanan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0% | N/A Dokumen | 0 Dokumen | 0% |
| 2.09.04.2.01.01 | Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan | Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan untuk pemutakhiran dan analisis ketahanan, kerentanan pangan | 8 desa | 8 desa | 0 desa | 0 desa | - | N/A desa | 0 desa | 0% |
| | | Jumlah peta rawan pangan yang disusun | 1 Peta rawan pangan | 0 Peta rawan pangan | N/A Peta rawan pangan | N/A Peta rawan pangan | N/A | N/A Peta rawan pangan | N/A Peta rawan pangan | N/A |
| 2.09.04.2.02 | Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota | Persentase desa tahan pangan yang ditangani | 100 % | N/A % | 63 % | 63 % | 100 | N/A % | 63 % | 63% |
| 2.09.04.2.02.01 | Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota | 2 Laporan | N/A Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | N/A Laporan | 1 Laporan | 50% |
| 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | PERSENTASE SAMPEL UJI YANG AMAN | 98.5 % | 96.67 % | N/A % | N/A % | N/A | N/A % | N/A % | N/A |
| | | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan | 99 % | N/A % | 98.5 % | 98.0 % | 99.49% | N/A % | 99 % | 100% |
| 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rekomendasi hasil uji yang ditindaklanjuti | 16 rekomendasi | 8 rekomendasi | 8 rekomendasi | 8 rekomendasi | 100 | N/A rekomendasi | 8 rekomendasi | 50% |
| 2.09.05.2.01.05 | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana yang disediakan | 4 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 | N/A Jenis | 2 Jenis | 50% |
| | | Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang diuji | 120 Sampel | 60 Sampel | 60 Sampel | 60 Sampel | 100 | N/A Sampel | 60 Sampel | 50% |
| 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | PERSENTASE PERTUMBUHAN PRODUKSI IKAN TANGKAP | 0.07 % | 0.13 % | 0.13 % | 0.13 % | 100.00 | N/A % | 0.07 % | 100% |
| 3.25.03.2.01 | Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sugai, danau, waduk, rawa dan | Persentase cakupan | 5.88 % | 5.88 % | N/A % | N/A % | N/A | N/A % | N/A % | N/A |
| | | Produksi perikanan | 150.580 Ton | N/A Ton | 150.8 Ton | 150.8 Ton | 100.00 | N/A Ton | 150.800 Ton | 100% |
| 3.25.03.2.01.01 | Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan | Dokumen data dan informasi sumber daya ikan | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.00 | N/A Dokumen | 1 Dokumen | 50% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|-----------------|---|---|--|---|--|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 3.25.03.2.01.03 | Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap | Jumlah restocking benih ikan | 160,000 Ekor | 70,000 Ekor | 105,000 Ekor | 105,000 Ekor | 100.00 | N/A Ekor | 105,000 Ekor | 66% |
| | | Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang dibantu | 2 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 100.00 | N/A paket | 1 paket | 50% |
| 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase nelayan yang mendapatkan fasilitasi | 1.75 % | 1.75 % | 1.75 % | 1.75 % | 100.00 | N/A % | 1.75 % | 100% |
| 3.25.03.2.02.01 | Pengembangan kapasitas nelayan kecil | Jumlah nelayan yang mendapatkan bimtek | 20 Orang Nelayan | 10 Orang Nelayan | 10 Orang Nelayan | 10 Orang Nelayan | 100.00 | N/A Orang Nelayan | 10 Orang Nelayan | 50% |
| 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | PERSENTASE PERTUMBUHAN PRODUKSI IKAN BUDIDAYA | 0.18 % | 0.17 % | 0.18 % | 0.18 % | 100.00 | N/A % | 0.18 % | 100% |
| | | Persentase Peningkatan Produksi Benih | 7 % | 3.78 % | 4 % | 3.6 % | 90.00 | N/A % | 7 % | 100% |
| 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil | Persentase kelompok pembudidaya ikan yang meningkat kelas kelompoknya | Pemula : 9.74 % | 9.62 % | 9.74 % | 10.24 % | 98.97 | N/A % | 9.74 % | 100% |
| | | | Madya : 7.14 % | 6.95 % | 7.14 % | 5.85 % | 100 | N/A % | 7.1 % | 100% |
| 3.25.04.2.02.01 | Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek | 329 Peserta | 135 Peserta | 134 Peserta | 134 Peserta | 100.00 | N/A Peserta | 134 Peserta | 41% |
| 3.25.04.2.02.02 | Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudiaya ikan kecil | Jumlah peserta pembinaan dan penyuluhan kelembagaan usaha perikanan | 110 Peserta | 40 Peserta | 40 Peserta | 40 Peserta | 100.00 | N/A Peserta | 40 Peserta | 36% |
| 3.25.04.2.04 | Pengelolaan pembudidayaan ikan | Jumlah Produksi ikan Budidaya | 29,354 Ton | 14,676 Ton | 14,687.9 Ton | 14,703 Ton | 100.10 | N/A Ton | 14,703.1 Ton | 50% |
| | | Jumlah Produksi benih ikan di UPT | 490,481 Ekor | 292,870 Ekor | 262,350 Ekor | 440,300 Ekor | 167.83 | N/A Ekor | 440,300.0 Ekor | 90% |
| 3.25.04.2.04.01 | Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen data dan informasi pembudidayaan ikan | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.00 | N/A Dokumen | N/A Dokumen | #VALUE! |
| 3.25.04.2.04.02 | Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam | Jumlah prasarana yang dipenuhi untuk UPT | 1 Unit | 1 Unit | 0 Unit | 0 Unit | #DIV/0! | N/A Unit | 0 Unit | 0% |
| 3.25.04.2.04.03 | Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana pembudidaya ikan yang dibantu | 24 Paket | 14 Paket | 7 Paket | 7 Paket | 100.00 | N/A Paket | 7 Paket | 29% |
| | | Jumlah pengadaan sarana perbenihan di UPT | 120 Ekor Induk | 82 Ekor Induk | 60 Ekor Induk | 60 Ekor Induk | 100.0% | N/A Ekor Induk | 60 Ekor Induk | 50% |
| | | Jumlah pakan | 6,780 Kg Pakan | 2,364 Kg Pakan | 2,350 Kg Pakan | 3,580 Kg Pakan | 152.3% | N/A Kg Pakan | 3,580 Kg Pakan | 53% |
| 3.25.04.2.04.04 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah monitoring kesehatan ikan | 24 Kali | 14 Kali | 14 Kali | 26 Kali | 185.71 | N/A Kali | 26 Kali | 108% |
| | | Jumlah uji kualitas air dan ikan pada pembudidaya ikan | 20 Sampel | 10 Sampel | 20 Sampel | 13 Sampel | 65.00 | N/A Sampel | 13 Sampel | 65% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|-----------------|--|---|--|---|--|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 3.25.04.2.04.07 | Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah kaji terap yang dilaksanakan di SAP | 2 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 100.00 | N/A kali | 1 kali | 50% |
| | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A | N/A Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Nilai Tambah Hasil olahan perikanan | 2,274,974,123 Rp | 1,195,868,500 Rp | 1,161,462,199 Rp | 1,077,162,555 Rp | 92.74 | N/A Rp | 1,077,162,555 Rp | 47% |
| 3.25.06.2.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Produksi hasil Olahan Perikanan | 78,504.61 Kg | 49,866.23 Kg | 40,495.59 Kg | 42,829 Kg | 106 | N/A Kg | 42,829.30 Kg | 55% |
| 3.25.05.2.02.01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah pelaku usaha pengolahan yang difasilitasi pemasaran produk | 8 Pelaku Usaha | 0 Pelaku Usaha | 8 Pelaku Usaha | 6 Pelaku Usaha | - | N/A Pelaku Usaha | 6 Pelaku Usaha | 75% |
| | | Jumlah peserta bimbingan teknis pengolahan hasil produksi perikanan | 240 Peserta | 90 Peserta | 200 Peserta | 200 Peserta | 100.00 | N/A Peserta | 200 Peserta | 83% |
| | | Jumlah peserta sosialisasi gemarikan dan pengenalan perikanan bagi pelajar | 230 Peserta | 30 Peserta | 100 Peserta | 125 Peserta | 125.00 | N/A Peserta | 125 Peserta | 54% |
| 2.09.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100.00 | N/A % | 100 % | 100% |
| 2.09.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100.00 | N/A % | 100 % | 100% |
| 2.09.01.2.01.01 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun | 5 Dokumen | 3 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100.00 | N/A Dokumen | 2 Dokumen | 40% |
| 2.09.01.2.01.06 | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun | 10 Laporan | 5 Laporan | 5 Laporan | 5 Laporan | 100.00 | N/A Laporan | 5 Laporan | 50% |
| 2.09.01.2.02 | Administrasi, Keuangan perangkat Daerah | Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100.00 | N/A % | 100 % | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---------------------|---|---|--|---|--|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2.09.01.2.02.01 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup SKPD yang difasilitasi | 14 Bulan | 14 Bulan | 14 Bulan | 14 Bulan | 100.00 | N/A Bulan | 14 Bulan | 100% |
| 2.09.01.2.02.03 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah terbayarnya honor pengelola keuangan | 12 bulan | N/A bulan | 12 bulan | 12 bulan | N/A | N/A bulan | 12 bulan | 100% |
| 2.09.01.2.02.05 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD yang tersusun | 36 Laporan | 18 Laporan | 18 Laporan | 18 Laporan | 100.00 | N/A Laporan | 18 Laporan | 50% |
| 2.09.01.2.02.07 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD | 2 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.00 | N/A Laporan | 1 Laporan | 50% |
| 2.09.01.2.03 | Administrasi barang milik Daerah pada perangkat Daerah | Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100.00 | N/A % | 100 % | 100% |
| 2.09.01.2.03.06 | Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen pengelolaan aset PD yang tersusun | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100.00 | N/A dokumen | 1 dokumen | 100% |
| 2.09.01.2.06 | Administrasi umum perangkat Daerah | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100.00 | N/A % | 100 % | 100% |
| 2.09.01.2.06.01 | Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan | Jumlah komponen instalasi | 16 Jenis | 8 Jenis | 8 Jenis | 8 Jenis | 100.00 | N/A Jenis | 8 Jenis | 50% |
| 2.09.01.2.06.02 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi | 61 Jenis | 61 Jenis | 59 Jenis | 59 Jenis | 100.00 | N/A Jenis | 59 Jenis | 97% |
| 2.09.01.2.06.03 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah peralatan rumah tangga PD yang terfasilitasi | 13 Jenis | 13 Jenis | 11 Jenis | 11 Jenis | 100.00 | N/A Jenis | 11 Jenis | 85% |
| 2.09.01.2.06.04 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi | 134 Orang | 67 Orang | 0 Orang | 0 Orang | - | N/A Orang | 0 Orang | 0% |
| | | Jumlah volume BBM yang distribusikan | 3,542 Liter | N/A Liter | 3,542 Liter | 3,919.15 Liter | 110.65 | N/A Liter | 3,919.15 Liter | 111% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|-----------------|--|---|--|---|--|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2.09.01.2.06.05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah pemenuhan barang cetak | 44.241 Lembar | 21.241 Lembar | 2,080 Lembar | 4,314 Lembar | 207.40 | N/A Lembar | 4,314 Lembar | 9751% |
| | | Jumlah pemenuhan barang penggandaan | 100 Buku | 50 Buku | 8,547 Buku | 14,443 Buku | 168.98 | N/A Buku | 14,443 Buku | 14443% |
| 2.09.01.2.06.06 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah pemenuhan bahan bacaan | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 100.00 | N/A Jenis | 2 Jenis | 100% |
| 2.09.01.2.06.09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 160 Kali | 35 Kali | 35 Kali | 35 Kali | 100.00 | N/A Kali | 35 Kali | 22% |
| 2.09.01.2.07 | Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah | Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana | 100 % | 100 % | 100 % | 200 % | 200.00 | 100 % | 100 % | 100% |
| 2.09.01.2.07.10 | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya | Jumlah pengadaan sarana gedung kantor | 11 Unit | 4 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 100.00 | N/A Unit | 2 Unit | 18% |
| 2.09.01.2.08 | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100.00 | N/A % | 100 % | 100% |
| 2.09.01.2.08.02 | Penyediaan jasa komunikasi sumber Daya air dan listrik | Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi | 12 Bulan | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100.00 | N/A Bulan | 12 Bulan | 100% |
| 2.09.01.2.08.04 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum | 2 Jenis | Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 100.00 | N/A Jenis | 2 Jenis | 100% |
| 2.09.01.2.09 | Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100.00 | N/A % | 100 % | 100% |
| 2.09.01.2.09.01 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan | 1. Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 100.00 | N/A Unit | 1 Unit | 100% |
| | | 2. Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan pajaknya | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 100.00 | N/A Unit | 1 Unit | 100% |
| 2.09.01.2.09.02 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan | 1. Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara | 36 Unit | 36 Unit | 4 Unit | 4 Unit | 100.00 | N/A Unit | 4 Unit | 11% |
| | | 2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya | 36 Unit | 36 Unit | 36 Unit | 36 Unit | 100.00 | N/A Unit | 36 Unit | 100% |
| 2.09.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD yang dipelihara | 4 Gedung | 2 Gedung | 2 Gedung | 1 Gedung | 50.00 | N/A Gedung | 1 Gedung | 25% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|-----------------|--|--|--|---|--|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2.09.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara | 165 Unit | 84 Unit | 57 Unit | 57 Unit | 100.00 | N/A Unit | 57 Unit | 35% |
| | Administrasi kepegawaian perangkat Daerah | Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 100 % | N/A % | 100 % | 100 % | N/A | N/A % | 100 % | 100% |
| | Pengadaan pakain Dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah pakain dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi | 82 Stel | N/A Stel | 28 Stel | 27 Stel | N/A | N/A Stel | 27 Stel | 33% |
| | | | | | | | | | | |
| 2.09.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase Cadangan Pangan Masyarakat | 0.7 % | N/A % | N/A % | N/A % | N/A | N/A % | N/A % | N/A |
| 2.09.02.201 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah cadangan pangan masyarakat | 1,272 kg/tribulan | N/A kg/tribulan | N/A kg/tribulan | N/A kg/tribulan | N/A | N/A kg/tribulan | N/A kg/tribulan | N/A |
| 2.09.02.201.01 | Penyediaan infrastruktur lumbung pangan | Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia | 4 Unit | N/A Unit | N/A Unit | N/A Unit | N/A | N/A Unit | N/A Unit | N/A |
| 2.09.02.201.02 | Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur | Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia | 4 Unit | N/A Unit | N/A Unit | N/A Unit | N/A | N/A Unit | N/A Unit | N/A |
| 2.09.02.201.03 | Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia | 11 Unit | N/A Unit | N/A Unit | N/A Unit | N/A | N/A Unit | N/A Unit | N/A |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | PERSENTASE CAPAIAN KONSUMSI PANGAN TERHADAP AKG | Energi 89,07%; % Protein 100% | N/A % | N/A % | N/A % | N/A | N/A % | N/A % | N/A |
| 2.09.03.201 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Tingkat Stabilitas Harga Pangan Strategis | 2 % | N/A % | N/A % | N/A % | N/A | N/A % | N/A % | N/A |
| 2.09.03.201.01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 2 Laporan | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|--------------------|--|---|--|---|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2.09.03.20 1.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 13 Laporan | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A |
| 2.09.03.20 1.04 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | 12 Dokumen | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A |
| 2.09.03.20 1.06 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan | 62 Unit | N/A Unit | N/A Unit | N/A Unit | N/A | N/A Unit | N/A Unit | N/A |
| 2.09.03.20 4 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Angka Konsumsi Pangan | AKE : 1.915,16 Kkal/kap/hr dan AKP : 57 gr/kap/hr | N/A Kkal/kap/hr dan gr/kap/hr | N/A Kkal/kap/hr dan gr/kap/hr | N/A Kkal/kap/hr dan gr/kap/hr | N/A | N/A Kkal/kap/hr dan gr/kap/hr | N/A Kkal/kap/hr dan gr/kap/hr | N/A |
| | | Jumlah kelompok P2L yang Aktif | 50 Kelompok | N/A Kelompok | N/A Kelompok | N/A Kelompok | N/A | N/A Kelompok | N/A Kelompok | N/A |
| 2.09.03.20 4.01 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | 1 Dokumen | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A |
| 2.09.03.20 4.02 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 5 Laporan | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A |
| 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | PERSENTASE DESA SANGAT TAHAN PANGAN | 100 % | N/A % | N/A % | N/A % | N/A | N/A % | N/A % | N/A |
| | | Persentase daerah rentan rawan pangan | 0 % | N/A % | N/A % | N/A % | N/A | N/A % | N/A % | N/A |
| 2.09.04.20 1 | Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan | Dokumen hasil pemutakhiran peta kerentanan dan ketahanan pangan | 1 Dokumen | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A |
| 2.09.04.20 1.01 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan | 12 Dokumen | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A |
| 2.09.04.20 2 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase desa tahan pangan yang ditangani | 100 % | N/A % | N/A % | N/A % | N/A | N/A % | N/A % | N/A |
| 2.09.04.20 2.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|----------------|--|--|--|---|--|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan | 99.5 % | N/A % | N/A % | N/A % | N/A | N/A % | N/A % | N/A |
| 2.09.05.201 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rekomendasi hasil uji yang ditindaklanjuti | 8 Rekomendasi | N/A Rekomendasi | N/A Rekomendasi | N/A Rekomendasi | N/A | N/A Rekomendasi | N/A Rekomendasi | N/A |
| 2.09.05.201.05 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A |
| 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | PERSENTASE PERTUMBUHAN PRODUKSI IKAN TANGKAP | 0.08 % | N/A % | N/A % | N/A % | N/A | N/A % | N/A % | N/A |
| 3.25.03.201 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Produksi perikanan tangkap | 150,685 Ton | N/A Ton | N/A Ton | N/A Ton | N/A | N/A Ton | N/A Ton | N/A |
| 3.25.03.201.01 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 Dokumen | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A |
| 3.25.03.201.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | 2 Unit | N/A Unit | N/A Unit | N/A Unit | N/A | N/A Unit | N/A Unit | N/A |
| 3.25.03.202 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase nelayan yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan | 1.75 % | N/A % | N/A % | N/A % | N/A | N/A % | N/A % | N/A |
| 3.25.03.202.01 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya | 10 Orang | N/A Orang | N/A Orang | N/A Orang | N/A | N/A Orang | N/A Orang | N/A |
| 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | PERSENTASE PERTUMBUHAN PRODUKSI IKAN BUDIDAYA | 0.19 % | N/A % | N/A % | N/A % | N/A | N/A % | N/A % | N/A |
| | | Persentase Peningkatan Produksi Benih | 10 % | N/A % | N/A % | N/A % | N/A | N/A % | N/A % | N/A |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|-------------------|---|---|--|---|--|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 3.25.04.202 | Pemberdayaan PembudiDaya Ikan Kecil | Persentase kelompok pembudidaya ikan yang meningkat kelas kelompoknya | Pemula : 10.5; % Madya : 7.80 | N/A % | N/A % | N/A % | N/A | N/A % | N/A % | N/A |
| 3.25.04.202.01 | Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | 13 Kelompok | N/A Kelompok | N/A Kelompok | N/A Kelompok | N/A | N/A Kelompok | N/A Kelompok | N/A |
| 3.25.04.202.02 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | 22 Kelompok | N/A Kelompok | N/A Kelompok | N/A Kelompok | N/A | N/A Kelompok | N/A Kelompok | N/A |
| 3.25.04.202.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Jumlah Produksi ikan Budidaya | 14,713 Ton | N/A Ton | N/A Ton | N/A Ton | N/A | N/A Ton | N/A Ton | N/A |
| | | Jumlah Produksi benih ikan di UPT | 300,800 Ekor | N/A Ekor | N/A Ekor | N/A Ekor | N/A | N/A Ekor | N/A Ekor | N/A |
| 3.25.04.202.04.01 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A |
| 3.25.04.202.04.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 7 Unit | N/A Unit | N/A Unit | N/A Unit | N/A | N/A Unit | N/A Unit | N/A |
| 3.25.04.202.04.04 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | 4 Dokumen | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A |
| 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Nilai Tambah Hasil olahan perikanan | 1,209,412,473 Rp | N/A Rp | N/A Rp | N/A Rp | N/A | N/A Rp | N/A Rp | N/A |
| 3.25.06.202 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Produksi hasil Olahan Perikanan | 42,982.16 Kg | N/A Kg | N/A Kg | N/A Kg | N/A | N/A Kg | N/A Kg | N/A |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|--------------------|--|---|--|---|--|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 3.25.06.20 2.01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | 7 pelaku usaha | N/A pelaku usaha | N/A pelaku usaha | N/A pelaku usaha | N/A | N/A pelaku usaha | N/A pelaku usaha | N/A |
| x.xx.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR | 100 % | N/A % | N/A % | N/A % | N/A | N/A % | N/A % | N/A |
| x.xx.01.20 1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan | 100 % | N/A % | N/A % | N/A % | N/A | N/A % | N/A % | N/A |
| x.xx.01.20 1.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A |
| x.xx.01.20 1.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A |
| x.xx.01.20 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | 100 % | N/A % | N/A % | N/A % | N/A | N/A % | N/A % | N/A |
| x.xx.01.20 2.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 29 Orang/bulan | N/A Orang/bulan | N/A Orang/bulan | N/A Orang/bulan | N/A | N/A Orang/bulan | N/A Orang/bulan | N/A |
| x.xx.01.20 2.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A |
| x.xx.01.20 2.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|--------------------|---|--|--|---|--|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| x.xx.01.20 2.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 16 Laporan | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A |
| x.xx.01.20 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan | 100 % | N/A % | N/A % | N/A % | N/A | N/A % | N/A % | N/A |
| x.xx.01.20 3.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A |
| x.xx.01.20 6 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100 % | N/A % | N/A % | N/A % | N/A | N/A % | N/A % | N/A |
| x.xx.01.20 6.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 9 Paket | N/A Paket | N/A Paket | N/A Paket | N/A | N/A Paket | N/A Paket | N/A |
| x.xx.01.20 6.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 60 Paket | N/A Paket | N/A Paket | N/A Paket | N/A | N/A Paket | N/A Paket | N/A |
| x.xx.01.20 6.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 11 Paket | N/A Paket | N/A Paket | N/A Paket | N/A | N/A Paket | N/A Paket | N/A |
| x.xx.01.20 6.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | N/A Paket | N/A Paket | N/A Paket | N/A | N/A Paket | N/A Paket | N/A |
| x.xx.01.20 6.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | N/A Paket | N/A Paket | N/A Paket | N/A | N/A Paket | N/A Paket | N/A |
| x.xx.01.20 6.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A | N/A Dokumen | N/A Dokumen | N/A |
| x.xx.01.20 6.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40 Laporan | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A |
| x.xx.01.20 7 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur | 100 % | N/A % | N/A % | N/A % | N/A | N/A % | N/A % | N/A |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|--------------------|---|--|--|---|--|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| x.xx.01.20 7.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Disediakan | 1 Unit | N/A Unit | N/A Unit | N/A Unit | N/A | N/A Unit | N/A Unit | N/A |
| x.xx.01.20 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | N/A % | N/A % | N/A % | N/A | N/A % | N/A % | N/A |
| x.xx.01.20 8.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A |
| x.xx.01.20 8.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 24 Laporan | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A | N/A Laporan | N/A Laporan | N/A |
| x.xx.01.20 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | 100 % | N/A % | N/A % | N/A % | N/A | N/A % | N/A % | N/A |
| x.xx.01.20 9.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | N/A Unit | N/A Unit | N/A Unit | N/A | N/A Unit | N/A Unit | N/A |
| x.xx.01.20 9.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 37 Unit | N/A Unit | N/A Unit | N/A Unit | N/A | N/A Unit | N/A Unit | N/A |
| x.xx.01.20 9.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 2 Unit | N/A Unit | N/A Unit | N/A Unit | N/A | N/A Unit | N/A Unit | N/A |
| x.xx.01.20 9.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 70 Unit | N/A Unit | N/A Unit | N/A Unit | N/A | N/A Unit | N/A Unit | N/A |
| x.xx.01.20 5 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 82 Unit | N/A Unit | N/A Unit | N/A Unit | N/A | N/A Unit | N/A Unit | N/A |
| x.xx.01.20 5.02 | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 82 Unit | N/A Unit | N/A Unit | N/A Unit | N/A | N/A Unit | N/A Unit | N/A |

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024

Nama SKPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | ANALISIS HASIL KEBUTUHAN | | | | | |
|---------------------|---|--------|--|----------------|----------------------|--------------------------|---|--------|--|----------------|----------------------|
| NO | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) | NO | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | | PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR | 100% | 6,450,891,690 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | | PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR | 100% | 5,604,500,432 |
| | Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah | | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan | 100% | 27,099,000 | | Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah | | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan | 100% | 16,424,800 |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 10,456,500 | | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 6,871,200 |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan | 5 Laporan | 16,642,500 | | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan | 5 Laporan | 9,553,600 |
| | Administrasi, Keuangan perangkat Daerah | | Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | 100% | 5,103,002,975 | | Administrasi, Keuangan perangkat Daerah | | Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | 100% | 4,733,270,657 |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 28 Orang/Bulan | 4,921,939,175 | | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 28 Orang/Bulan | 4,588,808,007 |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | 176,064,000 | | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | 141,210,000 |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1,940,000 | | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1,048,750 |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan | 18 Laporan | 3,059,800 | | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan | 18 Laporan | 2,203,900 |
| | Administrasi kepegawaian perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD | 100% | 30,000,000 | | Administrasi kepegawaian perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian | 100% | 14,400,000 |
| | Pengadaan pakain Dinas beserta atribut kelengkapannya | | Jumlah Paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya | 24 Paket | 30,000,000 | | Pengadaan pakain Dinas beserta atribut kelengkapannya | | Jumlah Paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya | 24 Paket | 14,400,000 |
| | Administrasi umum perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 468,057,315 | | Administrasi umum perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 271,672,525 |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 15,000,200 | | Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 4,267,700 |
| | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 49,998,115 | | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 34,422,275 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | ANALISIS HASIL KEBUTUHAN | | | | | |
|---------------------|--|--------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|--|--------|--|--------------------------|----------------------|
| NO | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) | NO | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga | 2 Paket | 11,142,000 | | Penyediaan peralatan rumah tangga | | Jumlah Paket Peralatan Rumah | 2 Paket | 4,606,950 |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 200,000,000 | | Penyediaan bahan logistik kantor | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 123,680,000 |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan | 2 Paket | 17,006,500 | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan | 2 Paket | 9,161,600 |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 74,900,000 | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 28,352,000 |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 Laporan | 100,010,500 | | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 25 Laporan | 67,182,000 |
| | Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan | | Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 96,283,400 | | Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan | | Persentase realisasi pengadaan sarana dan | 100% | 10,000,000 |
| | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 Unit | 96,283,400 | | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau | 1 Unit | 10,000,000 |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah | | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 393,120,000 | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah | | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 392,400,000 |
| | Penyediaan jasa komunikasi sumber Daya air dan listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Laporan | 162,000,000 | | Penyediaan jasa komunikasi sumber Daya air dan listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan | 12 Laporan | 162,000,000 |
| | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan | 12 Laporan | 231,120,000 | | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan | 12 Laporan | 230,400,000 |
| | Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan | | Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik | 100% | 333,329,000 | | Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan | | Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik | 100% | 166,332,450 |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 20,000,000 | | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 40,110,000 |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 36 Unit | 165,969,000 | | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 36 Unit | 60,812,550 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 100,000,000 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 29,519,900 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang | 81 Unit | 47,360,000 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan | 81 Unit | 35,890,000 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | | PERSENTASE CADANGAN PANGAN MASYARAKAT | 0.85% | 875,074,000 | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | | PERSENTASE CADANGAN PANGAN MASYARAKAT | 0.85% | 581,091,400 |
| | Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah kabupaten/Kota | | Jumlah cadangan pangan masyarakat | 1.476 Kg/Tribulan | 875,074,000 | | Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah kabupaten/Kota | | Jumlah cadangan pangan masyarakat | 1.476 Kg/Tribulan | 581,091,400 |
| | Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya | | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian | 3 Unit | 875,074,000 | | Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya | | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian | 3 Unit | 581,091,400 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | ANALISIS HASIL KEBUTUHAN | | | | | | |
|---------------------|---|--|---|--|----------------------|--------------------------|---|--|--|--|----------------------|-------------|
| NO | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) | NO | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIVIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | PERSENTASE CAPAIAN KONSUMSI PANGAN TERHADAP AKG (Energi) | 88,34% (Energi) | 1,676,429,500 | 1 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIVIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | PERSENTASE CAPAIAN KONSUMSI PANGAN TERHADAP AKG (Energi) | 88,34% (Energi) | 1,018,061,150 | |
| | | | PERSENTASE CAPAIAN KONSUMSI PANGAN TERHADAP AKG (Protein) | 100 % (Protein) | | | | | PERSENTASE CAPAIAN KONSUMSI PANGAN TERHADAP AKG (Protein) | 100 % (Protein) | | |
| | | Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan | | Tingkat Stabilitas Harga Pangan Strategis | 4% | 1,166,905,500 | | Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan | | Tingkat Stabilitas Harga Pangan Strategis | 4% | 782,265,750 |
| | | Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan | | Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 13 Laporan | 109,191,200 | | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | 13 dokumen | 117,525,750 |
| | | Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 2 Laporan | 706,060,100 | | Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 2 Laporan | 354,101,550 |
| | | Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan | | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | 12 Dokumen | 118,839,300 | | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan | | Informasi Harga dan Pasokan Pangan | 12 Dokumen | 115,148,700 |
| | Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia | | Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan | 27 Unit | 59,599,900 | | Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia | | Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan | 27 Unit | 40,082,400 | |
| 1 | Peningkatan ketahanan pangan keluarga | | Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga | 140 Keluarga | 173,215,000 | | Peningkatan ketahanan pangan keluarga | | Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga | 140 Keluarga | 155,407,350 | |
| | Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan | | Angka Konsumsi Pangan pada Wilayah dengan Skor PPH Ideal | 13 Kecamatan | 509,524,000 | | Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan | | Angka Konsumsi Pangan pada Wilayah dengan Skor | 13 Kecamatan | 235,795,400 | |
| | Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun | | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | 1 Dokumen | 122,000,000 | | Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun | | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | 1 Dokumen | 70,795,400 | |
| | Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal | | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya | 5 Laporan | 387,524,000 | | Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal | | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi | 5 Laporan | 165,000,000 | |
| | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | PERSENTASE DESA RENTAN RAWAN PANGAN | 0% | 294,299,750 | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | PERSENTASE DESA RENTAN RAWAN PANGAN | 0% | 173,838,200 | |
| | Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan | | Dokumen analisa hasil pemuktahiran peta kerentanan dan ketahanan pangan | 1 Dokumen | 147,683,750 | | Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan | | Dokumen analisa hasil pemuktahiran peta kerentanan dan ketahanan pangan | 1 Dokumen | 85,000,000 | |
| | Penyusunan, pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan | | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan | 1 Dokumen | 147,683,750 | | Penyusunan, pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan | | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan | 1 Dokumen | 85,000,000 | |
| | Penanganan kerawanan pangan kewenangan | | Jumlah Desa rawan pangan yang ditangani | 6 Desa | 146,616,000 | | Penanganan kerawanan pangan kewenangan | | Jumlah Desa rawan pangan yang ditangani | 6 Desa | 88,838,200 | |
| | Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | 6 Laporan | 146,616,000 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota | 6 Laporan | 88,838,200 | |
| | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | PERSENTASE SAMPEL UJI YANG AMAN | 98.33% | 112,595,500 | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | PERSENTASE SAMPEL UJI YANG AMAN | 98.33% | 79,000,000 | |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | ANALISIS HASIL KEBUTUHAN | | | | | |
|---------------------|---|--------|---|----------------|----------------------|--------------------------|---|--------|---|----------------|----------------------|
| NO | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) | NO | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar | | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan uji pangan segar | 63 Rekomendasi | 112,595,500 | | Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar | | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan uji pangan | 63 Rekomendasi | 79,000,000 |
| | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah | 4 Laporan | 41,050,600 | | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah | | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah | 4 Laporan | 27,000,000 |
| | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal | 2 Dokumen | 71,544,900 | | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar | | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal | 2 Dokumen | 52,000,000 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | PERSENTASE PERTUMBUHAN PRODUKSI IKAN TANGKAP | 0.14% | 66,855,000 | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | PERSENTASE PERTUMBUHAN PRODUKSI IKAN TANGKAP | 0.14% | 63,020,700 |
| | Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sugai, danau, | | Produksi perikanan tangkap | 151,21 Ton | 60,726,000 | | Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sugai, | | Produksi perikanan tangkap | 151,21 Ton | 59,117,700 |
| | Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan | | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu | 1 Dokumen | 5,146,500 | | Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan | | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam | 1 Dokumen | 3,543,400 |
| | Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap | | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | 2 Unt | 55,579,500 | | Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap | | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | 2 Unt | 55,574,300 |
| | Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase nelayan yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan | 1.75% | 6,129,000 | | Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase nelayan yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan | 1.75% | 3,903,000 |
| | Pengembangan kapasitas nelayan kecil | | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya | 10 Orang | 6,129,000 | | Pengembangan kapasitas nelayan kecil | | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya | 10 Orang | 3,903,000 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | PERSENTASE PERTUMBUHAN PRODUKSI IKAN BUDIDAYA | 0.20% | 1,162,699,500 | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | PERSENTASE PERTUMBUHAN PRODUKSI IKAN BUDIDAYA | 0.20% | 601,568,933 |
| | Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil | | Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang meningkat kelas kelompoknya | 22 Kelompok | 150,000,000 | | Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil | | Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang meningkat kelas kelompoknya | 22 Kelompok | 99,540,400 |
| | Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan | | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan | 22 Kelompok | 150,000,000 | | Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan | | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan | 22 Kelompok | 99,540,400 |
| | Pengelolaan pembudidayaan ikan | | Jumlah produksi ikan budidaya | 14.760,26 Ton | 1,012,699,500 | | Pengelolaan pembudidayaan ikan | | Jumlah produksi ikan budidaya | 14.760,26 Ton | 502,028,533 |
| | | | Jumlah produksi benih ikan di UPT | 432.500 Ekor | | | | | Jumlah produksi benih ikan di UPT | 432.500 Ekor | |
| | Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 183,622,600 | | Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 147,335,700 |
| | Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 4 Unit | 591,937,000 | | Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 4 Unit | 224,493,133 |
| | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | 1 Dokumen | 25,855,000 | | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | 1 Dokumen | 30,000,000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | ANALISIS HASIL KEBUTUHAN | | | | | |
|---------------------|--|--------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|--|--------|---|--------------------------|----------------------|
| NO | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) | NO | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | | Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat | 160 Orang | 211,284,900 | | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | | Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat | 160 Orang | 100,199,700 |
| | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | NILAI TAMBAH HASIL OLAHAN PERIKANAN | Rp. 1.264.085.793 | 341,491,100 | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | NILAI TAMBAH HASIL OLAHAN PERIKANAN | Rp. 1.264.085.793 | 225,228,200 |
| | Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota | | Jumlah produksi hasil olahan perikanan | 45.079,92 Kg | 341,491,100 | | Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota | | Jumlah produksi hasil olahan perikanan | 45.079,92 Kg | 225,228,200 |
| | Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah ketersediaan peningkatan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota (Ton) | 0,6 Ton | 116,421,000 | | Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah ketersediaan peningkatan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota (Ton) | 0,6 Ton | 85,000,000 |
| | Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam satu daerah Kab/Kota | 180 Pelaku Usaha | 225,070,100 | | Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam satu daerah Kab/Kota | 180 Pelaku Usaha | 140,228,200 |

Tabel 3.1

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang**

| Kode | Sasaran Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Sasaran Sub Kegiatan/Kinerja | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Ranwal Renja Tahun 2024 | | | | Catatan |
|-----------------|---|---|---|---|---|--|-------------------------|------------------------|----------------|-------------|---------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.09.01 | MENINGKATNYA CAPAIAN KINERJA APARATUR | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR | | | | Kabupaten Jombang | 100% | 5,604,500,432 | APBD | |
| 2.09.01.2.01 | Tersusunnya dokumen perencanaan penggaran dan evaluasi kinerja yang sesuai aturan | Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai | | | | Kabupaten Jombang | 100% | 16,424,800 | APBD | |
| 2.09.01.2.01.01 | | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kabupaten Jombang | 2 Dokumen | 6,871,200 | APBD | |
| 2.09.01.2.01.06 | | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kabupaten Jombang | 5 Laporan | 9,553,600 | APBD | |
| 2.09.01.2.02 | Terpenuhinya gaji pegawai secara tepat waktu | Administrasi, Keuangan perangkat Daerah | Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | | | | Kabupaten Jombang | 100% | 4,733,270,657 | APBD | |
| 2.09.01.2.02.01 | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kabupaten Jombang | 28 Orang/Bulan | 4,588,808,007 | APBD | |
| 2.09.01.2.02.03 | | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kabupaten Jombang | 4 Dokumen | 141,210,000 | APBD | |
| 2.09.01.2.02.05 | | | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kabupaten Jombang | 1 Laporan | 1,048,750 | APBD | |
| 2.09.01.2.02.07 | | | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kabupaten Jombang | 18 Laporan | 2,203,900 | APBD | |
| 2 09 01 2.05 | | Administrasi kepegawaian perangkat Daerah | Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Dinas Ketahanan Pangan dan | | | | Kabupaten Jombang | 100% | 14,400,000 | APBD | |
| 2 09 01 2.05.02 | | | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Pengadaan pakain Dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan | Kabupaten Jombang | 24 Paket | 14,400,000 | APBD | |

| Kode | Sasaran Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Sasaran Sub Kegiatan/Kinerja | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Ranwal Renja Tahun 2024 | | | | Catatan |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|------------------------|----------------|-------------|---------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.09.01.2.06 | Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran | Administrasi umum perangkat Daerah | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | | | | Kabupaten Jombang | 100% | 271,672,525 | APBD | |
| 2.09.01.2.06.01 | | | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kabupaten Jombang | 1 Paket | 4,267,700 | APBD | |
| 2.09.01.2.06.02 | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kabupaten Jombang | 3 Paket | 34,422,275 | APBD | |
| 2.09.01.2.06.03 | | | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Kabupaten Jombang | 2 Paket | 4,606,950 | APBD | |
| 2.09.01.2.06.04 | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kabupaten Jombang | 2 Paket | 123,680,000 | APBD | |
| 2.09.01.2.06.05 | | | | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Kabupaten Jombang | 2 Paket | 9,161,600 | APBD | |
| 2.09.01.2.06.06 | | | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Kabupaten Jombang | 2 Dokumen | 28,352,000 | APBD | |
| 2.09.01.2.06.09 | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kabupaten Jombang | 25 Laporan | 67,182,000 | APBD | |
| 2.09.01.2.07 | Terwujudnya pengadaan sarana prasarana untuk kelancaran kegiatan | Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah | Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur | | | | Kabupaten Jombang | 100% | 10,000,000 | APBD | |
| 2.09.01.2.07.10 | | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Kabupaten Jombang | 1 Unit | 10,000,000 | APBD | |
| 2.09.01.2.08 | Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah | | | | Kabupaten Jombang | 100% | 392,400,000 | APBD | |
| 2.09.01.2.08.02 | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan jasa komunikasi sumber Daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kabupaten Jombang | 12 Laporan | 162,000,000 | APBD | |
| 2.09.01.2.08.04 | | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kabupaten Jombang | 12 Laporan | 230,400,000 | APBD | |

| Kode | Sasaran Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Sasaran Sub Kegiatan/Kinerja | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Ranwal Renja Tahun 2024 | | | | Catatan |
|-----------------|--|---|---|---|--|--|-------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|---------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.09.01.2.09 | Terdapatnya pemeliharaan sarpras untuk kelancaran kegiatan | Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah | Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik | | | | Kabupaten Jombang | 100% | 166,332,450 | APBD | |
| 2.09.01.2.09.01 | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kabupaten Jombang | 1 Unit | 40,110,000 | APBD | |
| 2.09.01.2.09.02 | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kabupaten Jombang | 36 Unit | 60,812,550 | APBD | |
| 2.09.01.2.09.09 | | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kabupaten Jombang | 2 Unit | 29,519,900 | APBD | |
| 2.09.01.2.09.10 | | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kabupaten Jombang | 81 Unit | 35,890,000 | APBD | |
| 2.09.02 | MENINGKATNYA PERTUMBUHAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | PERSENTASE CADANGAN PANGAN MASYARAKAT | | | | Kabupaten Jombang | 0.85% | 581,091,400 | APBD | |
| 2.09.02.2.01 | Meningkatkan jumlah cadangan pangan masyarakat | Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan | Jumlah cadangan pangan masyarakat | | | | Kabupaten Jombang | 1.476 Kg/Tribulan | 581,091,400 | APBD | |
| 2.09.02.2.01.03 | | | | Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan | Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia | Kabupaten Jombang | 3 Unit | 581,091,400 | APBD | |
| 2.09.03 | TERWUJUDNYA CAPAIAN KONSUMSI PANGAN SESUAI AKG | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | PERSENTASE CAPAIAN KONSUMSI PANGAN TERHADAP AKG (Energi) PERSENTASE CAPAIAN KONSUMSI PANGAN TERHADAP AKG (Protein) | | | | Kabupaten Jombang | 88,34% (Energi) 100 % (Protein) | 1,018,061,150 | APBD | |
| 2.09.03.2.01 | Meningkatkan stabilitas harga pangan strategis | Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga panga | Tingkat Stabilitas Harga Pangan Strategis | | | | Kabupaten Jombang | 4% | 782,265,750 | APBD | |

| Kode | Sasaran Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Sasaran Sub Kegiatan/Kinerja | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Ranwal Renja Tahun 2024 | | | | Catatan |
|---------------------|--|--|--|---|---|---|--------------------------|------------------------|--------------------|-------------|---------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.09.03.2.01.01 | | | | | Penyusunan neraca bahan makanan (NBM) | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | Kabupaten Jombang | 13 Dokumen | 117,525,750 | APBD | |
| 2.09.03.2.01.03 | | | | Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya | Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Kabupaten Jombang | 2 Laporan | 354,101,550 | APBD | |
| 2.09.03.2.01.04 | | | | | Pemantauan harga dan pasokan pangan | Informasi Harga dan Pasokan Pangan | Kabupaten Jombang | 12 Dokumen | 115,148,700 | APBD | |
| 2.09.03.2.01.06 | | | | Berkembangnya kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia | Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia | Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan | Kabupaten Jombang | 27 Unit | 40,082,400 | APBD | |
| | | | | | Peningkatan ketahanan pangan keluarga | Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga | Kabupaten Jombang | 140 Keluarga | 155,407,350 | APBD | |
| 2.09.03.2.04 | Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan yang B2SA | Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/Tahun sesuai dengan angka | Angka Konsumsi Pangan pada Wilayah dengan Skor PPH Ideal | | | | | 13 Kecamatan | 235,795,400 | APBD | |
| 2.09.03.2.04.01 | | | | Terlaksananya penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita per tahun | Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Kabupaten Jombang | 1 Dokumen | 70,795,400 | APBD | |
| 2.09.03.2.04.02 | | | | Terlaksananya pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal | Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Kabupaten Jombang | 5 Laporan | 165,000,000 | APBD | |
| 2.09.04 | TERWUJUDNYA DESA SANGAT TAHAN PANGAN | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | PERSENTASE DESA RENTAN RAWAN PANGAN | | | | Kabupaten Jombang | 0% | 173,838,200 | APBD | |
| 2.09.04.2.01 | Terlaksananya penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan | Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan | Dokumen analisa hasil pemuktahiran peta kerentanan dan ketahanan pangan | | | | Kabupaten Jombang | 1 Dokumen | 85,000,000 | APBD | |
| 2.09.04.2.01.01 | | | | Tersusunnya pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan | Penyusunan, pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | | 1 Dokumen | 85,000,000 | | |
| 2.09.04.2.02 | Terlaksananya desa tahan pangan yang ditangani | Penanganan kerawanan pangan kewenangan | Jumlah Desa rawan pangan yang ditangani | | | | Kabupaten Jombang | 6 Desa | 88,838,200 | APBD | |
| 2.09.04.2.02.01 | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota | Kabupaten Jombang | 6 Laporan | 88,838,200 | APBD | |

| Kode | Sasaran Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Sasaran Sub Kegiatan/Kinerja | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Ranwal Renja Tahun 2024 | | | | Catatan |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|-------------------------|------------------------|----------------|-------------|---------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.09.05 | MENINGKATNYA PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | PERSENTASE SAMPEL UJI YANG AMAN | | | | Kabupaten Jombang | 98.33% | 79,000,000 | APBD | |
| 2.09.05.2.01 | Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar | Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan uji pangan segar asal tumbuhan yang ditindak lanjuti | | | | Kabupaten Jombang | 63 Rekomendasi | 79,000,000 | APBD | |
| | | | | Penerbitan rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Jombang | 4 Laporan | 27,000,000 | APBD | |
| 2.09.05.2.01.05 | | | | | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | Kabupaten Jombang | 2 Dokumen | 52,000,000 | APBD | |
| 3.25.03 | MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | PERSENTASE PERTUMBUHAN PRODUKSI IKAN TANGKAP | | | | Kabupaten Jombang | 0.14% | 63,020,700 | APBD | |
| 3.25.03.2.01 | Terlaksananya pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota dan pengelolaan penangkapan ikan | Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sugai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah | Produksi perikanan tangkap | | | | Kabupaten Jombang | 151,21 Ton | 59,117,700 | APBD | |
| 3.25.03.2.01.01 | | | | Tersedianya data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam satu Kabupaten/ Kota | Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia | Kabupaten Jombang | 1 Dokumen | 3,543,400 | APBD | |
| 3.25.03.2.01.03 | | | | Tersedianya sarana usaha perikanan tangkap | Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | Kabupaten Jombang | 2 Unt | 55,574,300 | APBD | |
| 3.25.03.2.02 | Terlaksananya pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota dan pengelolaan penangkapan ikan | Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase nelayan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan | | | | | 1.75% | 3,903,000 | APBD | |
| 3.25.03.2.02.01 | | | | Meningkatnya kapasitas nelayan kecil | Pengembangan kapsitas nelayan kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | Kabupaten Jombang | 10 Orang | 3,903,000 | APBD | |
| 3.25.04 | MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | PERSENTASE PERTUMBUHAN PRODUKSI IKAN BUDIDAYA | | | | Kabupaten Jombang | 0.20% | 601,568,933 | APBD | |
| 3.25.04.2.02 | Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok perikanan | Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil | Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang meningkat kelas kelompoknya | | | | Kabupaten Jombang | 22 Kelompok | 99,540,400 | APBD | |
| 3.25.04.2.02.02 | | | | Terlaksananya fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil | Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | Kabupaten Jombang | 22 Kelompok | 99,540,400 | APBD | |

| Kode | Sasaran Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Sasaran Sub Kegiatan/Kinerja | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Ranwal Renja Tahun 2024 | | | | Catatan |
|-----------------------------------|--|---|--|---|--|---|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------|---------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.25.04.2.04 | Terlaksananya pengelolaan pembudidayaan ikan dan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil | Pengelolaan pembudidayaan ikan | Jumlah produksi ikan budidaya | | | | Kabupaten Jombang | 14.760,26 Ton | 502,028,533 | APBD | |
| Jumlah produksi benih ikan di UPT | | | 432.500 Ekor | | | | | | | | |
| 3.25.04.2.04.01 | | | | Tersedianya data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Jombang | 2 Dokumen | 147,335,700 | APBD | |
| 3.25.04.2.04.03 | | | | Terjaminnya ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Jombang | 4 Unit | 224,493,133 | APBD | |
| 3.25.04.2.04.04 | | | | Tersedianya hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | Kabupaten Jombang | 1 Dokumen | 30,000,000 | APBD | |
| 3.25.04.2.04.05 | | | | Terbinanya pembudidayaan ikan di darat | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat | Kabupaten Jombang | 160 Orang | 100,199,700 | APBD | |
| 3.25.06 | MENINGKATNYA NILAI TAMBAH HASIL OLAHAN PERIKANAN | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | NILAI TAMBAH HASIL OLAHAN PERIKANAN | | | | Kabupaten Jombang | Rp. 1.264.085.793 | 225,228,200 | APBD | |
| 3.25.06.2.02 | | Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah | Jumlah produksi hasil olahan perikanan | | | | Kabupaten Jombang | 45.079,92 Kg | 225,228,200 | APBD | |
| 3.25.05.2.02.01 | | | | Meningkatnya ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota | Jumlah ketersediaan peningkatan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota (Ton) | Kabupaten Jombang | 0,6 Ton | 85,000,000 | APBD | |
| | | | | Tersedianya fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam satu daerah Kab/Kota | Kabupaten Jombang | 180 Pelaku Usaha | 140,228,200 | APBD | |
| TOTAL | | | | | | | | | 8,346,309,015 | | |